



PEMERINTAH
KABUPATEN
BONDOWOSO



Abd. Hamid Wahid
Bupati Bondowoso



As'ad Yahya Syafi'i
Wakil Bupati Bondowoso

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO INSPEKTORAT

Jalan Ahmad Yani Nomor 19, Dabasah, Bondowoso, Jawa Timur 68211,
Telepon (0332) 422574,
Laman inspektorat.bondowosokab.go.id Pos-el: inspektorat.bwoso@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUNG TRI HANDONO.SH,MM.
NIP : 19700510 198903 1 005
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bondowoso
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IV.c

Menerangkan bahwa telah dilakukan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Tahun Anggaran 2025 oleh tim Inspektorat Kabupaten Bondowoso sesuai Pedoman Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggungjawab manajemen. evaluasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan evaluasi kami, dapat ditemukan sistematika penyusunan draf LPPD tahun 2025 pada sebagian urusan masih belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara umum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah telah menunjukkan upaya pencapaian kinerja pada berbagai sektor pelayanan publik dan fungsi pemerintahan. Sejumlah indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah telah mencapai target yang ditetapkan, terutama pada urusan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan sebagian besar urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, kualitas penyajian data dan informasi kinerja dalam dokumen LPPD masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait ketidakselarasan antara IKK outcome dan output, ketidaksesuaian data pada aplikasi E-LPPD dengan bukti dukung, serta rumusan perhitungan indikator yang belum sepenuhnya sesuai pedoman.

Selain itu, dari aspek sistematika dan kelengkapan laporan masih terdapat beberapa bagian dokumen yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD, seperti ketidakkonsistenan data pada bagian pendahuluan, belum lengkapnya penjelasan capaian kinerja makro, serta belum disajikannya beberapa data dan sumber informasi yang diperlukan dalam tabel dan uraian analisis kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan konsolidasi data antar perangkat daerah dalam penyusunan LPPD masih perlu diperkuat. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah diraih serta

permasalahan yang masih ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek pengelolaan data kinerja, konsistensi penyajian informasi, serta kepatuhan terhadap pedoman penyusunan LPPD agar kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan terima kasih.

Bondowoso, 13 Maret 2026

INSPEKTUR KABUPATEN BONDOWOSO

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bondowoso Inspectorate. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO" around the top and "INSPEKTUR KABUPATEN BONDOWOSO" around the bottom. In the center is a smaller emblem. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. AGUNG TRI HANDONO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19700510 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak atas dukungan kerjasama dan kolaborasinya sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaen Bondowoso Tahun Anggaran 2025 ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ini adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bondowoso dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (2025).

Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, LPPD juga merupakan alat komunikasi dan pengikat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sebagai alat bantu dalam pembinaan oleh Pemerintah, khususnya untuk penyusunan kebijakan otonomi daerah kedepannya yang selaras dengan regulasi yang ada. Meskipun demikian, kami mengakui bahwa tidak ada yang sempurna, dan kami paham bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas kami sepanjang tahun 2025.

Kami berkomitmen untuk terus berusaha melakukan perbaikan di tahun-tahun mendatang. Kami berdo'a semoga Alloh SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Bondowoso, 31 Maret 2026

BUPATI BONDOWOSO



ABD. HAMID WAHID

DAFTAR ISI		halaman
KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		2
DAFTAR TABEL		
BAB I PENDAHULUAN		6
	1.1 LATAR BELAKANG	6
	1.1.1 Penjelasan Umum	6
	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	23
	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	43
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		45
	2.1 Capaian Kinerja Makro	45
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	56
	2.2.1 Indikator Kinerja Hasil	56
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Penunjang Urusan Pemerintahan	77
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	80
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		106
	3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	106
	3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya	
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		109
	4.1 Urusan Pendidikan	109
	4.2 Bidang Urusan Kesehatan	120
	4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	128
	4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat	132
	4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	134
	4.6 Bidang Urusan Sosial	153
BAB V PENUTUP		161

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	halaman
Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2025	7
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2025	8
Tabel 1.3	Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Bondowoso	8
Tabel 1.4	Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Dukungan Personil Kabupaten Bondowoso Tahun 2025	14
Tabel 1.5	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	19
Tabel 1.6	Masukan Permasalahan Aktual/Isu Strategis di Daerah	21
Tabel 1.7	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	27
Tabel 1.8	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	28
Tabel 1.9	Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 2025	40
Tabel 2.1	Profil Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025	46
Tabel 2.2	Status Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025	47
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025	48
Tabel 2.4	PDRB perKapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025	50
Tabel 2.5	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan	52
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap LPPD tahun 2025	54
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap LPPD Tahun 2025	75
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	78
Tabel 2.9	Kategori Penilaian Capaian Kinerja	80
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	80
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal Tahun 2025	82
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2025	90
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia Tahun 2025	95
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025	97

Tabel 2.15	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya Tahun 2025	99
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan Tahun 2025	102
Tabel 3,1	Realisasi Anggaran	104
Tabel 3,2	Permasalahan dan Solusi	105
Tabel 3,3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi	106
Tabel 4.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025	107
Tabel 4.2	Anggaran Dasar Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025	108
Tabel 4.3	Anggaran Rincian Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025	108
Tabel 4.4	Indeks Hasil Capaian Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025	116
Tabel 4.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025	117
Tabel 4.6	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025	118
Tabel 4.7	Anggaran Dasar Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025	120
Tabel 4.8	Anggaran Rincian Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025	120
Tabel 4.9	Indeks Hasil Capaian Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025	123
Tabel 4.10	Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025	125
Tabel 4.11	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	126
Tabel 4.12	Anggaran Dasar Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	126
Tabel 4.13	Anggaran Rincian Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	127
Tabel 4.14	Indeks Hasil Capaian Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	127
Tabel 4.15	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	130
Tabel 4.16	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025	130
Tabel 4.17	Anggaran Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025	131
Tabel 4.18	Anggaran Rincian Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025	131
Tabel 4.19	Indeks Hasil Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025	132
Tabel 4.20	Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025	132
Tabel 4.21	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran	133

	2025	
Tabel 4.22	Anggaran Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	134
Tabel 4.23	Anggaran Rincian Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	134
Tabel 4.24	Indeks Hasil Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	140
Tabel 4.25	Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	149
Tabel 4.26	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025	151
Tabel 4.27	Anggaran Dasar Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025	152
Tabel 4.28	Anggaran Rincian Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025	152
Tabel 4.29	Indeks Hasil Capaian Urusan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Tanggal 27 Januari 2026 Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025;

24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025;

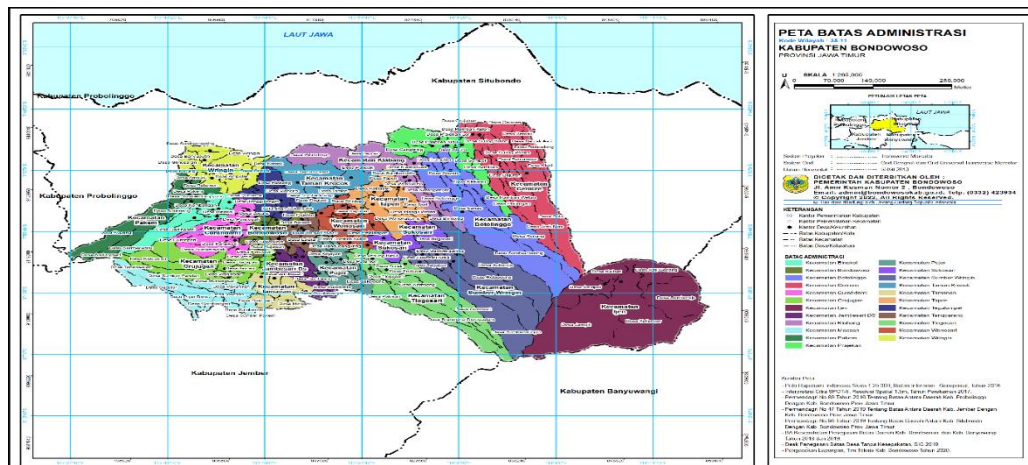
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025.

b. Data Geografis Daerah

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Gambar 1. 1
Peta Administratif



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2025.

Kabupaten Bondowoso secara geografis berada di wilayah bagian Timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi 7°50'10" sampai 7°56'41" Lintang Selatan dan 113°48'10" sampai 113°48'26" Bujur Timur.

Luas Wilayah Kab. Bondowoso mencapai 1. 560,10 Km² yang terbagi menjadi 23 Kecamatan, 209 Desa dan 10 Kelurahan. Ketinggian dari permukaan laut rata-rata mencapai $\pm$ 347 meter diatas permukaan laut. Wilayah tertinggi $\pm$ 3.287 mdpl dan terendah $\pm$ 54 meter. Kondisi dataran di Kab. Bondowoso terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, dataran tinggi 24,9 % dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah secara keseluruhan.

Pegunungan yang ada di Kabupaten Bondowoso adalah pegunungan Ijen yang terletak di bagian timur dan pegunungan Argopuro di sebelah barat. Sementara itu ada sekitar 35 sungai yang mengalir Kabupaten Bondowoso antara lain yaitu Sungai Deluang, Sungai Sampeyan Baru, Sungai Mrawan, Sungai Tlaga, Sungai Wonoboyo, dan lain-lain.

Tabel 1. 2
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Bondowoso Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
1.	Maesan	Maesan	-	12	62	13	5.608,30
2.	Grujugan	Taman	-	11	49	7	7.44,70
3.	Tamanan	Taman	-	9	52	15	2.815,10
4.	Jambesari Darus Sholah	Jambesari	-	9	41	10	3.010,50
5.	Pujer	Kejayan	-	11	80	12	3.988,90
6.	Tlogosari	Pakisan	-	10	98	17	11.091,70
7.	Sukosari	Sukosari Lor	-	4	31	22	2.317,27
8.	Sumberwringin	Sumberwringin	-	6	71	27	13.794,73
9.	Tapen	Tapen	-	9	52	16	5.704,20
10.	Wonosari	Wonosari	-	12	72	10	4.227,20
11.	Tenggarang	Tenggarang	1	11	69	2	2.579,50
12.	Bondowos	Dabasah	7	4	19	2	2.315,80
13.	Curahdami	Curahdami	1	11	111	3	5.028,59
14.	Binakal	Binakal	-	8	51	7	3.903,91
15.	Pakem	Patemon	-	8	47	18	6.208,20
16.	Wringin	Wringin	-	13	92	16	5.801,00
17.	Tegalampel	Sekarputih	1	7	54	2	3.702,75
18.	Taman Krocok	Taman	-	7	47	12	5.300,35
19.	Klabang	Klabang	-	11	49	19	9.120,40
20.	Botolinggo	Lumutan	-	8	100	25	12.741,45
21.	Ijen	Sempol	-	6	38	74	20.720,00
22.	Prajejan	Prajejan Lor	-	7	34	24	5.664,55
23.	Cermee	Cermee	-	15	93	32	12.920,40
JUMLAH			10	209	1.412	385	156.010,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso, 2025

c. Jumlah penduduk

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
di Kabupaten Bondowoso, 2025

KECAMATAN SUBDISTRICT	JENI KELAMIN (GENDER)		
	LAKI-LAKI/MALE (jiwa)	PEREMPUAN/FEMALE (jiwa)	JUMLAH (jiwa)
1	2	3	4
MAESAN	24.294	24.918	49.212
TAMANAN	19.654	19.881	39.535
TLOGOSARI	23.023	24.055	47.078
SUKOSARI	7.473	8.080	15.553
PUJER	19.733	20.861	40.594
GRUJUGAN	18.824	19.341	38.165
CURAH DAMI	17.386	17.503	34.889
TENGGARANG	21.536	22.437	43.973
WONOSARI	19.748	21.016	40.764
TAPEN	16.426	17.577	34.003
BONDOWOSO	37.481	39.324	76.805
WRINGIN	19.873	20.882	40.755
TEGALAMPEL	13.219	13.352	26.571
KLABANG	9.046	9.642	18.688
CERMEE	22.479	23.874	46.353
PRAJEKAN	12.465	13.179	25.644
PAKEM	11.459	11.903	23.362
SUMBERWRINGIN	17.148	17.979	35.127
SEMPOL	6.021	6.009	12.030
BINAKAL	8.291	8.775	17.066
TAMAN KROCOK	8.025	8.629	16.654
BOTOLINGGO	14.213	14.897	29.110
JAMBESARI DARUS SHOLAH	17.588	18.488	36.076
BONDOWOSO	38.5405	402.602	788.007

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2026

d. Jumlah Kecamatan dan Desa /Kelurahan

Jumlah desa dan Kelurahan di Kabupaten Bondowoso sebanyak 219 Desa/Kelurahan terdiri dari 10 Kelurahan dan 209 Desa tersebar di 23 Kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 3
Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Bondowoso Tahun 2025

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	MAESAN	1. SUCOLOR
		2. PUJER BARU
		3. TANAHWULAN
		4. MAESAN
		5. GAMBANGAN
		6. SUGER LOR
		7. SUMBER PAKEM
		8. SUMBERSARI
		9. SUMBER ANYAR
		10. PENANGGUNGAN
		11. PAKUNIRAN
		12. GUNUNGSARI
2.	TAMANAN	1. SUKOSARI
		2. KARANG MELOK
		3. MENGEN
		4. KEMIRIAN
		5. TAMANAN
		6. WONOSUKO
		7. KALIANYAR
		8. SUMBER KEMUNING
		9. SUMBER ANOM
3.	TLOGOSARI	1. KEMBANG
		2. GUNOSARI
		3. TROTOSARI
		4. JEBUNG KIDUL
		5. SULEK
		6. TLOGOSARI
		7. PAKISAN
		8. PATEMON
		9. JEBUNG LOR
		10. BRAMBANG DARUSSALAM
4.	SUKOSARI	1. SUKOSARI LOR
		2. NOGOSARI
		3. PECALONGAN
		4. KERANG

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
5.	PUJER	1. ALAS SUMUR
		2. KEJAYAN
		3. MANGLI
		4. MASKUNING KULON
		5. MASKUNING WETAN
		6. MENGOK
		7. PADASAN
		8. RANDU CANGKRING
		9. SUKO KERTO
		10. SUKOWONO
		11. SUKODONO
6.	GRUJUGAN	1. TEGAL MIJIN
		2. PEKAUMAN
		3. SUMBER PANDAN
		4. WANISODO
		5. KABUARAN
		6. WONOSARI
		7. DADAPAN
		8. DAWUHAN
		9. TAMAN
		10. GRUJUGAN KIDUL
		11. KEJAWAN
7.	CURAHDAMI	1. CURAHDAMI
		2. JETIS
		3. PAKUWESI
		4. KUPANG
		5. PETUNG
		6. PANAMBANGAN
		7. CURAHPOH
		8. PONCOGATI
		9. SUMBER SUKO
		10. SELOLEMBU
		11. LOCARE
		12. SUMBER SALAK
8.	TENGGARANG	1. TENGGARANG
		2. KESEMEK
		3. LOJAJAR
		4. PEKALANGAN

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		5. KAJAR
		6. SUMBER SALAM
		7. KONCER KIDUL
		8. BATAAN
		9. GEBANG
		10. DAWUHAN
		11. TANGSIL KULON
		12. KONCER DARUL AMAN
9.	WONOSARI	1. LOMBOK KULON
		2. LOMBOK WETAN
		3. TUMPENG
		4. JUMPONG
		5. TANGSIL WETAN
		6. PASAREJO
		7. BENDOARUM
		8. KAPURAN
		9. SUMBERKALONG
		10. TRAKTAKAN
		11. WONOSARI
		12. PELALANGAN
10.	TAPEN	1. WONOKUSUMO
		2. MANGLI WETAN
		3. TAAL
		4. MRAWAN
		5. GUNUNG ANYAR
		6. JURANG SAPI
		7. CINDOGO
		8. KALITAPEN
		9. TAPEN
11.	BONDOWOSO	1. NANGKAAN
		2. TAMANSARI
		3. KADEMANGAN
		4. DABASAH
		5. BADEAN
		6. KOTAKULON
		7. BLINDUNGAN
		8. PANCORAN
		9. SUKOWIRYO

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		12. KEMBANG
		13. PEJATEN
12.	WRINGIN	1. AMBULU
		2. BUKOR
		3. SUMBERMALANG
		4. JAMBEWUNGU
		5. GUBRIH
		6. AMPELAN
		7. JATITAMBAN
		8. BANYUWULU
		9. JATISARI
		10. GLINGSERAN
		11. BANYUPUTIH
		12. WRINGIN
		13. SUMBERCANTING
13.	TEGALAMPEL	1. SEKARPUTIH
		2. KLABANG
		3. MANDIRO
		4. TANGGULANGIN
		5. KARANGANYAR
		6. TEGALAMPEL
		7. KLABANG AGUNG
		8. PURNAMA
14.	KLABANG	1. KARANG ANYAR
		2. BLIMBING
		3. KARANG SENGON
		4. WONOKERTO
		5. KLABANG
		6. KLAMPOKAN
		7. SUMBER SUKO
		8. BESUK
		9. PANDAK
		10. LEPRAK
		11. WONOBOYO
15.	CERMEE	1. SOLOR
		2. KLADI
		3. BERCAK
		4. SULING WETAN

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		5. SULING KULON
		6. CERMEE
		7. RAMBAN WETAN
		8. GRUJUGAN
		9. RAMBAN KULON
		10. BAJURAN
		11. JIREK MAS
		12. BATU SALANG
		13. PALALANGAN
		14. BATU AMPAR
		15. BERCAK ASRI
16.	PRAJEKAN	1. BANDILAN
		2. SEMPOL
		3. TARUM
		4. PRAJEKAN LOR
		5. PRAJEKAN KIDUL
		6. CANGKRING
		7. WALIDONO
17.	PAKEM	1. ANDUNGSARI
		2. ARDISAENG
		3. KUPANG
		4. GADINGSARI
		5. PAKEM
		6. SUMBERDUMPYONG
		7. PATEMON
		8. PETUNG
18.	SUMBERWRINGIN	1. SUKOREJO
		2. SUMBER GADING
		3. SUKOSARI KIDUL
		4. TEGALJATI
		5. REJO AGUNG
		6. SUMBERWRINGIN
19.	SEMPOL	1. SEMPOL
		2. KALIANYAR
		3. JAMPIT
		4. KALISAT
		5. KALI GEDANG
		6. SUMBER REJO

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
20.	BINA KAL	1. GADINGSARI
		2. SUMBER WARU
		3. KEMBANGAN
		4. BARATAN
		5. BINA KAL
		6. JERUKSOKSOK
		7. SUMBER TENGAH
		8. BENDELAN
21.	TAMAN KROCOK	1. TAMAN
		2. GENTONG
		3. KEMUNINGAN
		4. TREBUNGAN
		5. SUMBERKOKAP
		6. PAGUAN
		7. KRETEK
22.	BOTOLINGGO	1. LUMUTAN
		2. BOTOLINGGO
		3. LANAS
		4. PENANG
		5. GAYAM
		6. KLEKEHAN
		7. SUMBER CANTING
		8. GAYAM LOR
23.	JAMBESARI DARUS SHOLAH	1. JAMBESARI
		2. JAMBEANOM
		3. PUCANGANOM
		4. SUMBERJERUK
		5. TEGALPASIR
		6. PENGARANG
		7. GRUJUGAN LOR
		8. PEJAGAN
		9. SUMBER ANYAR

*Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten Bondowoso, 2025*

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Struktur dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Terdapat total 50 (lima puluh) Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso. Ditambah dengan 1 (satu) Rumah Sakit Daerah. Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso antara lain terdiri atas:

- a. 1 (satu) Sekretariat Daerah
- b. 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. 1 (satu) Inspektorat;
- d. 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. 1 (satu) Rumah Sakit Daerah
- f. 17 (tujuh Belas) Dinas;
- g. 6 (enam) Badan; dan
- h. 23 (dua puluh tiga) Kecamatan

Dalam rangka menjalankan tugas utama dan fungsi perangkat daerah. Diperlukan adanya dukungan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan Publik. Jumlah Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bondowoso mencapai 8.573 Orang.

Tabel 1. 4
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Dukungan Personil
Kabupaten Bondowoso Tahun 2025

No.	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Personal ASN			
		Jabatan Struktural yang ada	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	SEKRETARIAT DAERAH	1	0	0	1
2.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	1	0	0	1
3.	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	1	0	0	1
4.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	0	0

No.	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Personal ASN			
		Jabatan Struktural yang ada	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	0	0	1
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	0	0	1
7.	ASISTEN ADMNISTRASI UMUM	1	0	0	1
8.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	1	3	8	12
9.	BAGIAN HUKUM	1	5	11	17
10.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	0	7	8
11.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1	2	8	11
12.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	13	8	22
13.	BAGIAN ORGANISASI	1	2	10	13
14.	BAGIAN UMUM	1	1	43	45
15.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1	0	6	7
16.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	2	10	13
17.	INSPEKTORAT	8	24	17	49
18.	SEKRETARIAT DPRD	5	3	34	42
19.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8	6	67	81
BADAN					
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5	9	51	65
21.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13	4	43	60
22.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7	2	37	46
23.	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7	9	33	49
24.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	6	10	21
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	0	21	30

No.	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Personal ASN			
		Jabatan Struktural yang ada	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
DINAS					
26.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	4	24	33
	UPTD METROLOGI LEGAL	0	0	0	0
	UPTD PASAR	1	0	21	22
27.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	0	19	24
28.	DINAS KESEHATAN	4	26	63	93
	UOBK RSU DR. H. KOESNADI	5	329	194	528
	UPTD PUSKESMAS	0	773	309	1082
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	0	12	3	15
	UPTD INSTALASI FARMASI	0	6	2	8
	UPTD PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN YANKESTRAD	1	0	0	1
29.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5	113	78	196
	UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN	0	0	0	0
	UPTD BALAI PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0	0	0	0
	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5	22	52	79
	UPTD RUMAH POTONG HEWAN	0	0	14	14
	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	0	0	27	27
30.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	13	20	37
	DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	6	12	78	96
	UPTD BINA MARGA	7	0	83	90
	UPTD SUMBER DAYA AIR				
31.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	4	20	28

No.	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Personal ASN			
		Jabatan Struktural yang ada	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
32.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4	9	18	31
	UPTD PELATIHAN KERJA	0	4	2	6
33.	DINAS PENDIDIKAN	10	35	49	94
	UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL	0	2434	2190	4624
34.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	5	18	28
35.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	5	8	30	43
36.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	7	8	25	40
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1	0	0	1
37.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	3	145	153
38.	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	0	0	3	3
39.	DINAS PERHUBUNGAN	9	1	22	32
	UPTD PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	1	3	6	10
40.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	4	22	32
KECAMATAN					
41.	KECAMATAN BINAKAL	5	0	16	21
42.	KECAMATAN BONDOWOSO	35	0	39	74
43.	KECAMATAN BOTOLINGGO	6	0	14	20
44.	KECAMATAN CERMEE	6	0	15	21
45.	KECAMATAN CURAHDAMI	12	0	16	28
46.	KECAMATAN GRUJUGAN	5	0	14	19
47.	KECAMATAN IJEN	6	0	9	15
48.	KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH	6	0	8	14
49.	KECAMATAN KLABANG	7	0	15	22

No.	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Personal ASN			
		Jabatan Struktural yang ada	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
50.	KECAMATAN MAESAN	6	0	16	22
51.	KECAMATAN PAKEM	6	0	8	14
52.	KECAMATAN PRAJEKAN	7	0	9	16
53.	KECAMATAN PUJER	6	0	16	22
54.	KECAMATAN SUKOSARI	6	0	15	21
55.	KECAMATAN SUMBERWRINGIN	6	0	9	15
56.	KECAMATAN TAMAN KROCOK	5	0	8	13
57.	KECAMATAN TAMANAN	6	0	9	15
58.	KECAMATAN TAPEN	4	0	14	18
59.	KECAMATAN TEGALAMPEL	10	0	14	24
60.	KECAMATAN TENGGARANG	9	0	18	27
61.	KECAMATAN TLOGOSARI	6	0	15	21
62.	KECAMATAN WONOSARI	6	0	15	21
63.	KECAMATAN WRINGIN	6	0	9	15
Grand Total		365	3920	4288	8573

Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam APBD Tahun Anggaran 2025. anggaran belanja sebesar Rp2.099.298.409.750,00 dengan proporsi belanja sebesar 75,99% merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp1.595.247.613.150,00. Belanja Tidak Terduga sebesar 0,61% atau Rp12.829.536.311,00 Belanja Modal sebesar 7,88% atau sebesar Rp165.394.408.824,00 dan Belanja Transfer dengan proporsi sebesar 15,52% atau sebesar Rp325.826.851.465,00 Realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.477.162.062.957,47 atau 92,59% dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Barang Tidak Terduga sebesar Rp959.500.400,00 atau 7,47% dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp138.932.520.941,32 atau 84,00% dari pagu dan Belanja Transfer sebesar Rp310.809.958.929,00 atau 95,39% (*Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, Unaudited*).

Tabel 1. 5
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.002.738.750.068,00	1.976.283.781.125,88	98,67
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	326.119.972.068,00	302.057.303.790,88	92,62
4.1.01	Pajak Daerah	91.180.827.373,00	88.008.364.210,00	96,52
4.1.02	Retribusi Daerah	210.295.017.226,00	191.478.106.084,22	91,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	4.771.114.501,47	95,42
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.644.127.469,00	17.799.718.995,19	90,61
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	326.119.972.068,00	302.057.303.790,88	92,62
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.632.496.236.000,00	1.638.971.192.091,00	100,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.538.925.849.000,00	1.536.395.166.541,00	99,83
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.570.387.000,00	102.576.025.550,00	109,62
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	93.570.387.000,00	102.576.025.550,00	109,62
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.632.496.236.000,00	1.638.971.192.091,00	100,39
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.122.542.000,00	35.255.285.244,00	79,90
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.122.542.000,00	35.255.285.244,00	79,90
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.122.542.000,00	35.255.285.244,00	79,90
	JUMLAH PENDAPATAN	2.002.738.750.068,00	1.976.283.781.125,88	98,67
5	BELANJA DAERAH	2.099.298.409.750,00	1.927.864.043.227,79	91,83
5.1	BELANJA OPERASI	1.595.247.613.150,00	1.477.162.062.957,47	92,59
5.1.01	Belanja Pegawai	920.615.725.973,00	866.694.669.629,80	94,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.822.080.377,00	544.496.255.544,67	88,27
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.709.806.800,00	63.275.637.783,00	115,65
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.100.000.000,00	1.695.500.000,00	80,73
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.595.247.613.150,00	1.477.162.062.957,47	92,59
5.2	BELANJA MODAL	165.394.408.824,00	138.932.520.941,32	84,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.460.125.425,00	61.198.201.990,00	84,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.885.397.624,00	22.712.931.553,32	67,02

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.881.184.495,00	46.880.559.772,00	92,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.956.326.880,00	7.934.902.664,00	99,73
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	211.374.400,00	205.924.962,00	97,42
	JUMLAH BELANJA MODAL	165.394.408.824,00	138.932.520.941,32	84,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.829.536.311,00	959.500.400,00	7,47
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.829.536.311,00	959.500.400,00	7,47
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	12.829.536.311,00	959.500.400,00	7,47
5.4	BELANJA TRANSFER	325.826.851.465,00	310.809.958.929,00	95,39
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.084.895.925,00	10.084.895.925,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	315.741.955.540,00	300.725.063.004,00	95,24
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	325.826.851.465,00	310.809.958.929,00	95,39
	JUMLAH BELANJA	2.099.298.409.750,00	1.927.864.043.227,79	91,83
	SURPLUS/DEFISIT	-96.559.659.682,00	48.419.737.898,09	-50,14
6	PEMBIAYAAN DAERAH	96.559.659.682,00	96.691.460.682,98	100,13
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.559.659.682,00	96.691.460.682,98	100,13
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.559.659.682,00	96.559.659.682,98	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	131.801.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.559.659.682,00	96.691.460.682,98	100,13
	PEMBIAYAAN NETTO	96.559.659.682,00	96.691.460.682,98	100,13
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	145.111.198.581,07	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2025 (Unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan pemerintah daerah yang disusun didasarkan pada isu-isu strategis daerah dengan memperhatikan kondisi atau hal yang harus dicermati dalam perencanaan pembangunan yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan antara lain : telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih agar terjadi keselarasan dalam merumuskan isu-isu strategis.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPD 2025-2026 dan Rancangan RPJMD 2025-2029, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan telah mengacu pada visi, misi dan prioritas pembangunan daerah.

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta prioritas daerah tahun 2025 berpedoman kepada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029. Sedangkan program prioritas pembangunan tahunan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Tabel 1. 6

Masukan Permasalahan Aktual/Isu Strategis Di Daerah

No.	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
1.	Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi	1. Perekonomian Bondowoso tumbuh secara positif dari 4,87% pada tahun 2024 meningkat menjadi 5,32% pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tapal kuda pada tahun 2025 relative sama yaitu pada kisaran 5,28% - 5,50%.	1. Menurunnya tingkat pengangguran 2. Meningkatnya pendapatan penduduk 3. Menurunnya tingkat kemiskinan 4. Meningkatnya PAD 5. Meningkatnya konektivitas wilayah 6. Meningkatnya daya saing daerah 7. Meningkatnya kondusivitas Wilayah	1. Penguatan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2. Optimalisasi Potensi Lokal dan Sektor Unggulan 3. Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas wilayah 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi

No.	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
	Kemampuan keuangan daerah terbatas	2. PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari Rp.33,501 juta pada tahun 2024 menjadi Rp.35,872 juta pada tahun 2025.	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat 2. Meningkatnya daya beli masyarakat	1. Penguatan sektor unggulan daerah 2. Peningkatan nilai tambah produk daerah dengan hilirisasi industry 3. Penguatan UMKM , koperasi dan ekonomi kreatif 4. Peningkatan SDM dan perlindungan sosial
		3. Tahun 2025 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso mencapai angka 0,271 menunjukkan Tingkat Ketimpangan Rendah	5. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat 6. Menurunnya tingkat kemiskinan 7. Stabilitas ekonomi dan politik yang kondusif 8. Berkurangnya intervensi social kepada masyarakat 9. Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif	1. Peningkatan daya beli dan perlindungan sosial 2. Peningkatan lapangan usaha melalui pendidikan dan pelatihan kerja 3. Peningkatan pemberdayaan ekonomi local dan UMKM 4. Peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan 5. Pemerataan Infrastruktur
		6. Pendapatan daerah sebagian besar dari Dana Transfer Pusat. Dana transfer sebagian besar bersifat spesifik, banyak kegiatan yang bersifat mandatory seperti stunting, kemiskinan, pengangkatan P3K, dan lain lain sehingga anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai seluruh kewenangannya.	1. Menurunnya kapasitas fiskal dan operasional pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, antara lain : a. Terbatasnya pembangunan infrastruktur b. Terbatasnya dalam pelaksanaan program prioritas daerah c. Terbatasnya belanja rutin	1. Kreatif dan inovatif dalam peningkatan PAD 2. Efisiensi dalam belanja daerah

No.	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
			daerah	
2.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	IKLH Bondowoso Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,2 poin dari tahun 2024 menjadi sebesar 72,85 dengan kategori BAIK	1. Meningkatnya tingkat Kesehatan masyarakat karena kondisi udara dan air yang baik. 2. Meningkatnya nilai ekologis lingkungan 3. Meningkatnya ketahanan bencana karena lingkungan yang baik.	Peningkatan penanganan sampah secara komunal Peningkatan penanganan limbah Peningkatan restorasi sungai Peningkatan ruang terbuka hijau Reboisasi hutan Pengendalian emisi Pengendalian alih fungsi lahan Pertanian berkelanjutan
3.	Penanganan kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan sosial	Tingkat kemiskinan tahun 2025 membaik pada level 12,20% turun sebesar 0,40 poin persen dari tahun 2024 yang mencapai angka 12,60%.	Meningkatnya SDM dan kesejahteraan masyarakat; Meningkatnya daya beli dan produktivitas masyarakat; Meningkatnya kondusivitas social Meningkatnya efisiensi fiscal daerah	1. Peningkatan akurasi data dan sasaran penerima bantuan 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi local 3. Peningkatan SDM antara lain melalui balai latihan kerja dan beasiswa 4. Penguatan ketahanan pangan, 5. Integrasi program untuk penanganan kemiskinan dan stunting
		TPT tahun 2025 mengalami perbaikan pada angka 2,55 dibanding tahun 2024 yang mencapai angka 3,63	1. Meningkatnya pendapatan penduduk 2. Menurunnya tingkat kemiskinan 3. Meningkatnya PAD 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 5. Meningkatnya	1. Peningkatan link dan match pendidikan dan dunia usaha 2. Peningkatan iklim investasi 3. Peningkatan program padat karya 4. Pemberdayaan UMKM dan Wirausaha Muda

No.	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
			daya saing daerah dan produktivitas	5. Pengembangan ekonomi kreatif dan digital
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Capaian penunjang tata kelola pemerintahan terdiri dari: 1. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami penurunan dari 74,15 ditahun 2024 menjadi 74,11 ditahun 2025	1. Pemerintah daerah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari kategori penilaian Sakip 2. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran yang berpengaruh pada ketepatan sasaran program 3. Belum optimalnya dampak yang dirasakan masyarakat terhadap capaian outcome program	1. Penyelarasan Perencanaan (Cascading) yang berorientasi hasil (outcome) 2. Peningkatan evaluasi/ audit kinerja 3. Digitalisasi data kinerja 4. Peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam menjalankan SAKIP
		2. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemda stabil di angka 3,23 dengan status kinerja tinggi		
5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 71,22 pada tahun 2024, meningkat menjadi 71,72 pada tahun 2025	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Meningkatnya Pendapatan masyarakat 3. Pengurangan kemiskinan 4. Meningkatnya kesejahteraan social 5. Meningkatnya kondusivitas daerah	1. Peningkatan akses kesehatan 2. Peningkatan akses pendidikan 3. Pemberdayaan ekonomi local 4. Pengendalian inflasi 5. Peningkatan koordinasi lintas sektor

b. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso. Pernyataan visi Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2025-2029 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 adalah:

**Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global
dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan”
Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 memiliki
makna sebagai berikut:**

Kabupaten Bondowoso “Tangguh” dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Bondowoso diharapkan berkembang menjadi daerah yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan baik global maupun nasional, dengan daya tahan dan kemandirian yang berpijak di atas pemanfaatan potensi sumber daya lokal mencakup sumber daya manusia maupun sumber daya alam, baik yang terlihat (infrastruktur fisik) maupun yang tidak terlihat (kebudayaan, nilai dan norma lokal).

Selanjutnya, Kabupaten Bondowoso “Unggul” dapat diartikan sebagai daerah yang terdepan dalam pengelolaan pendidikan dan kesehatan yang transformatif untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam rangka merespon dinamika tantangan dan permasalahan perkembangan zaman. Kabupaten Bondowoso “Berdaya Saing Global” merupakan visi untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang memiliki kemampuan untuk mengangkat potensi lokal daerah sehingga mampu bersaing ditingkat global.

Sedangkan “Berbudaya” merupakan diksi untuk tetap menekankan arti penting nilai-nilai kearifan lokal sebagai jati diri pembangunan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Pokok visi selanjutnya yaitu “Bingkai Iman dan Taqwa” dapat diartikan sebagai nilai pondasi dari semua ikhtiar membangun Kabupaten Bondowoso berpijak di atas prinsip iman dan taqwa.

2. Misi Kabupaten Bondowoso

Misi adalah rumusan umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan beberapa factor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas langkah atau peta jalan (road map) yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Dengan Memanfaatkan Potensi Perekonomian Lokal Secara Berkelanjutan
2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Aksesibilitas Pelayanan Dengan Kemampuan Dan Keberdayaan Di Seluruh Lapisan Kehidupan Masyarakat
4. Meningkatkan Infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat
5. Membangun ekosistem harmonis melalui pelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan inklusif berbasis kearifan local

3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029. adalah sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 7
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan		Sasaran	
Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan Memanfaatkan Potensi Perekonomian lokal Secara Berkelanjutan.			
1.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Pertanian,Industri Pengolahan Dan Perdagangan)
		2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		3	Meningkatnya Investasi Daerah
		4	Meningkat nya Wirausaha Baru

Tujuan		Sasaran	
		5	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa
		6	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		7	Meningkatnya PenyerapanTenaga Kerja
		8	Meningkatnya KetahananPangan
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif dan Kualitas Pelayanan Publik yang berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat			
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Meningkatnya Kualitas PelayananPublik
		2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing SDM Melalui Aksesibilitas Pelayanan dengan Kemampuan dan Keberdayaan di Seluruh Lapisan Kehidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan			
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia	1	Meningkatnya KualitasPendidikan dan Literasi Masyarakat
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda
		4	Meningkatnya Kualitas Keluarga
Misi 4 : Meningkatkan Infrastruktur Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat			
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah Secara Merata
Misi 5 : Membangun Ekosistem Harmonis Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal			
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya	1	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
		2	Meningkatnya toleransi Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
		3	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban, serta Perlindungan Terhadap Masyarakat
2.	Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Inklusif dan Berkelanjutan	4	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
		5	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2025

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 1. 8
Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK					
1.	Birokrasi Merdeka	Seleksi pejabat daerah secara terbuka dan transparan melalui mekanisme seleksi meritokratis yang adil dan akuntabel	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Meningkatnya kualitas penilaian kerja ASN Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	BKPSDM
2.	Jaminan Kontrak PPPK	Jaminan perpanjangan kontrak bagi tenaga PPPK secara maksimal	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	BKPSDM
3.	Pengangkatan PPPK	Pengangkatan Tenaga Honorer, K2 (PTT/GTT, Teknis) menjadi ASN (PPPK) sesuai peraturan perundang-undangan	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	BKPSDM
4.	Aplikasi Digital KANDA	Transparansi Kinerja Pemerintah Melalui aplikasi digital KANDA (Kami Melayani, Anda Mengawasi)	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Kominfo

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
5.	Khidmat Terhormat	Award untuk pelayanan terbaik bagi organisasi/ unit pelayanan publik	Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya	Inspektorat
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	DPMD
			Penelitian dan Pengembangan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitas pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasidi daerah	Bapperida
6.	Fleksibilitas Dan Pendapatan Perangkat Desa	Meningkatkan pendapatan perangkat desa dalam mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	DPMD
7.	Dansus Dekraf	Program Dana Khusus untuk Desa Kreatif; Apresiasi dana khusus untuk pembangunan desa, tematik sesuai prioritas masing-masing desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	DPMD
8.	Jam Kerja Pak Desa	Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk Perangkat dan Kader Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	DPMD

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
9.	SATU-PADU (Satu Pintu Layanan Terpadu)	Sistem satu pintu, untuk pelayanan mudah terpadu	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Diskominfo
			Penanaman Modal	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP & Naker
10.	E-LANDUK (E-Layanan Kependudukan)	Kemudahan mengurus Administrasi Kependudukan melalui aplikasi digital	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Diskominfo
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Dispenduk
B.	Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan					
1.	1. Pupuk Gratis Untuk Tanaman Tembakau	Mendorong peningkatan kesejahteraan petani tembakau	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Diperta
2.	2. ASTANI	Asuransi untuk Petani Rawan Gagal Panen	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Diperta
3.	1 Desa 1 Klinik Pertanian	Pendampingan petani melalui 1 Desa 1 Petugas Pendamping Lapangan (PPL) dalam rangka peningkatan kualitas produksi, hasil panen, dan kelangkaan pupuk	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Diperta
4.	Pasar Digital	Aplikasi Pasar Digital untuk memperluas pemasaran hasil pertanian dan	Pertanian	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat	Diperta

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Perkebunan		Veteriner	veteriner	
			Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Diskominfo
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Diperta
			Perdagangan	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dispoperindag
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Dispoperindag
5.	Kerabat (Koperasi Bagi Buruh Tani)	Pembentukan Koperasi Buruh Tani untuk meminimalisir gerakan pinjaman online (pinjol)	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Diperta
			Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Dispoperindag
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Dispoperindag
6.	Belati	Bantuan Alat Pertanian untuk Buruh Tani	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Diperta
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan	DPMD

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				dan Masyarakat Hukum Adat	masyarakat hukum adat dalam pembangunan	
C.	BIDANG PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN					
1.	Si Zona	Redistribusi Penempatan Guru dan Tenaga Kesehatan sesuai zona domisili	Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Dispendik
2.	WFH Guru Di Hari Libur	Program Kerja dari Rumah, untuk guru sehat berkinerja optimal	Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Dispendik
3.	10.000 Beasiswa Pintar	Beasiswa Pendidikan untuk putra-putri daerah	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daera
4.	Bisarah	Bantuan Insentif untuk Para Hafidh Alquran	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daera
5.	Beasiswa Bondowoso Unggul	Beasiswa untuk mahasiswa Bondowoso berprestasi	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daera
6.	Senyum Cemerlang (Sekolah Nyaman untuk Murid Cemerlang)	Pendampingan Pendidikan Maksimal untuk Peserta didik berkebutuhan khusus	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Dispendik
			Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Dispusip
7.	Batara (Bantuan Tetap untuk Guru Agama)	Sebagai bentuk keberpihakan kepada guru ngaji, pesantren dan madrasah, serta Sekolah Minggu	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
8.	Buguru	Peningkatan Honor untuk Guru PAUD dan TK	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Dispendik
9.	Bantuan Untuk Lembaga RA		Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
10.	Hidmah Pesantren (Hibah Amanah untuk Pesantren)	Program hibah pesantren, untuk Bondowoso digdaya.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dispenduk
			Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya kualitas hidup dan perilaku hidup sehat warga pesantren dan lingkungan sekitarnya	DPKP CKTR
			Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	DLHP
11.	Jamin Segar (Jaminan kesehatan Gratis)	Jaminan Kesehatan Gratis untuk Seluruh Masyarakat Ber-KTP Bondowoso.	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Dinkes
12.	Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu	Peningkatan kesejahteraan kader untuk memperkuat pendampingan generasi unggul bebas stunting	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	DPMD
13.	Rumah Sakit Wilayah Perbatasan	Pembangunan rumah sakit pemerintah wilayah	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Dispenduk

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		utara-selatan (batas kota) untuk Layanan Kesehatan Maksimal		Gedung		
14.	Bondowoso Sport Center	Revitalisasi ruang/gedung/gelangan olah raga sebagai pusat aktivitas yang memuat aspek olah raga (sarana, pembinaan dan promosi atlet), edukasi, serta pariwisata buatan/manmade tourism dan kuliner	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	DPKP CKTR
			Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Disparpora
		Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Beasiswa Atlet Berprestasi	Disparpora
		Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Makan Bergizi Gratis Untuk Ibu Hamil & Menyusui	Dinkes
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		DPMP
D.	BIDANG EKONOMI					
1.	Hilirisasi Produk Lokal	Fasilitasi hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar yang lebih luas	Kelautan dan Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Disnak
			Perindustrian	Perencanaan Dan Pembangunan	Meningkatnya realisasi	Diskoperindag

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Industri	pembangunan industri	
			Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Diperta
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Diperta
2.	Kreanial (Rumah Kreatif untuk Milenial)	Ruang Kreativitas Milenial untuk Inovasi Pembangunan	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Diskominfo
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Diskoperindag
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Diperta
			Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Disapora
3.	BRK Reborn	Ikhtiar membangkitkan perekonomian sektor kopi	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Diskominfo
			Perindustrian	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Diskoperindag
			Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Diperta
			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Diperta

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Diperta
4.	Pemberdayaan UMKM dan Pedagang Kecil	Peningkatan kemampuan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Diskoperidag
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Diskoperidag
			Perdagangan	Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Diskoperidag
			Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreati	Disparpora
5.	Fasilitasi PKL	PKL Berdaya, Masyarakat Sejahtera, PKL menjadi mitra dunia industri	Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan dan distribusi perdagangan yang efisien	Diskoperidag
6.	Bondowoso Pusat Tridarma	Menjadikan Bondowoso sebagai pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional dan Internasional	Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kesbangpol
			Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Bapperida
E.	BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1.	1000 Kelompok Usaha Baru Untuk		Kelautan dan Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Dinas Petermakan

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	Bondowoso Tangguh					
			Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Diperta
			Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	DMPTSP & Naker
			Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Disparpora
2.	Ampuh (Angkatan Muda Pekerja Tangguh)	Short Course, Pendidikan Vokasi dan Uji Kompetensi untuk angkatan kerja. Optimalisasi BLK & Lembaga Sertifikasi	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DMPTSP & Naker
			Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DMPTSP & Naker
			Perindustrian	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	DMPTSP & Naker
			Perindustrian	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	DMPTSP & Naker
			Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Disparpora
3.	Rebranding Pariwisata Bondowoso	Event sebagai bagian penting dari pariwisata nasional & internasional	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Diskominfo
			Perdagangan	Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	DMPTSP & Naker
			Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
4.	Le Olle Bondowoso	Fasilitasi Pusat Oleh-oleh di destinasi wisata unggulan berbasis produk UMKM lokal	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	DMPTSP & Naker
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyediaan pusat oleh-oleh produk unggulan	DMPTSP & Naker
			Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Disparpora
5.	Travel Pattern Bondowoso	Perjalanan wisata nyaman melalui pariwisata terencana	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Disparpora
6.	Digisata (Digitalisasi Situs Pariwisata)	Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui Digitalisasi Situs Pariwisata dan Kebudayaan (Digital Site Map)	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Diskominfo
			Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Disparpora
F.	BIDANG SOSIAL BUDAYA					
1.	Permata (Perempuan Mandiri dan Tangguh)	Pemberdayaan perempuan untuk menciptakan keluarga Unggul Mandiri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	DMPTSP & Naker
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	DPMD

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Dinas Sosial
2.	Kasih Bunda	Kawal Anak Sehat Bahagia untuk Bondowoso Berdaya	Kelautan dan Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Disnak
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya Pasar Pangan Aman	Diskoperidag
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemenuhan hak anak	Dinas Sosial
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Sosial
3.	Kurikulum Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal		Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Dinas Pendidikan

No.	JANJI POLITIS	URAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	OUTCOME	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
4.	Insentif Untuk Modin	Peningkatan kualitas layanan untuk Masyarakat berdaya				
G.	BIDANG INFRASTRUKTUR					
1.	Rantas (Infrastruktur Jalan Tuntas)	Komitmen menuntaskan perbaikan jalan rusak	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	DPKP & Tata Ruang
2.	Bondowoso Menyala	Jalanan Terang Merata Sampai ke Desa	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Dishub
			Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	DLHP

Tabel 1.9
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 2025

FOCUS PEMBANGUNAN	PENJABARAN CAPAIAN
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan ARLS, AHLS, Akreditasi Sekolah, Sarana Prasarana Pendidikan serta Peningkatan Kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Ramah Anak dan Responsif Gender Penurunan KDRT Penurunan Prevalensi Stunting, Penurunan AKI Dan AKB Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan, serta pemenuhan jaminan kesehatan semesta (UHC) Pendewasaan Usia Pernikahan Peningkatan dan Pengembangan kreasi dan kemajuan pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan
2. Pembangunan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Ijen Geopark melalui Pengembangan UMKM dan Koperasi, Ekonomi Digital, Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan Peningkatan Nilai Tambah, Produksi Dan Produktivitas Produk Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Perternakan. Peningkatan Pola Pangan Harapan Peningkatan Status Desa melalui Padat Karya Desa, Optimalisasi Bumdesa serta Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Masyarakat Desa

FOCUS PEMBANGUNAN	PENJABARAN CAPAIAN
3. Pembangunan Lingkungan Hidup	Pembangunan SPAM, Sistem Pengelolaan air limbah dan penanganan kawasan kumuh Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau taman perkotaan Penyediaan Perumahan dan Perbaikan RTLH Pengendalian Degradasi Lingkungan Hidup Peningkatan penanganan dan upaya pengurangan sampah
4. Pembangunan Pemerintahan	Pemenuhan Sarpras Layanan Adminduk, Perluasan Jangkauan Pelayanan Dengan Digitalisasi Layanan, dan termanaftakannya data kependudukan untuk penetapan kebijakan Peningkatan Sinergitas Di Wilayah Kecamatan. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kapasitas SDM dan Kompetensi Teknis ASN Peningkatan Inovasi Daerah. Penerapan Tata Kelola Arsip Sesuai Kaidah dan Digitalisasi. Peningkatan Fasilitasi Penerapan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi. Optimalisasi E-Gov/SPBE dan Smart City. Penanganan Mitigasi, kedaruratan dan pasca bencana
5. Pembangunan Sosial	Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Optimalisasi Verval Data Kemiskinan Penanganan PPKS / PMKS

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Bondowos; 2025

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah alat ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi warga negaranya. SPM memuat jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan pemerintahan wajib yang termuat dalam SPM meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial. Penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Setiap tahunnya Pemerintah Daerah dituntut untuk melaporkan hasil penerapan SPM yang sekaligus menjadi muatan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai dasar penetapan insentif dan disinsentif daerah.

Laporan penerapan SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rentsra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan target dan capaian setiap urusan yang termuat dalam laporan penerapan SPM ke dalam program/kegiatan dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak tahun 2005, laporan penerapan SPM merupakan dokumen yang wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada Pemerintah Pusat. Selain jenis dan mutu pelayanan dasar, laporan penerapan SPM juga memuat indikator, formula indikator, target kinerja dan rencana aksi.

Menindaklanjuti pentingnya penyusunan laporan penerapan SPM, Kabupaten Bondowoso membentuk Tim Penerapan SPM yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bondowoso. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026.

ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2026 berfokus pada keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, serta optimalisasi jalan dan irigasi. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penyelesaian perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 25 kilometer melalui program Rantas (Resik-Resik Jalan) yang dimulai pada Februari 2026.

Adapun beberapa poin tujuan pembangunan Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Merata Berbasis Potensi Lokal;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah berupa pengukuran capaian kinerja makro. Capaian Kinerja Makro adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

Capaian ini tidak hanya mencerminkan kerja tunggal pemerintah daerah, melainkan hasil kolaborasi dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan daerah.

Terdapat 6 (enam) indikator makro yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja umum suatu daerah. Berikut adalah 6 indikator makro tersebut:

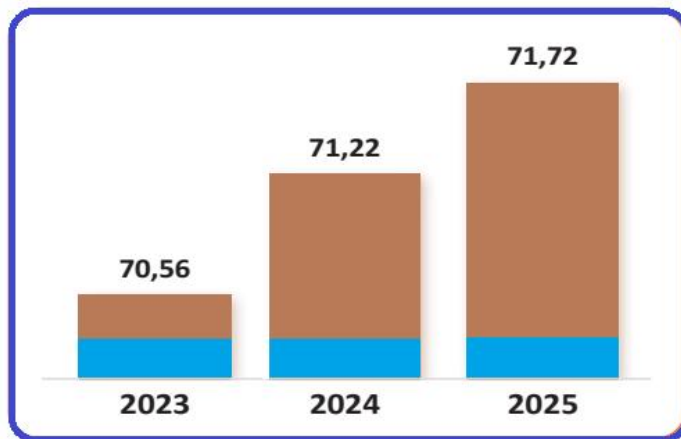
1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM):** Mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup (umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak).
2. **Angka Kemiskinan:** Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
3. **Angka Pengangguran:** Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT).
4. **Pertumbuhan Ekonomi:** Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
5. **Pendapatan Per Kapita:** Besarnya rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah yang didekati dengan menggunakan PDRB per Kapita.
6. **Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*):** Indikator yang menunjukkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah

Keenam indikator ini wajib dituangkan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi salah satu bagian utama dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah alat ukur statistik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 mencapai angka 71,72. Capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,50 poin atau tumbuh sebesar 0,70 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 71,22. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia Kabupaten Bondowoso berada pada kategori "**Tinggi**".



Perkembangan IPM Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 - 2025
menjadi 71,72 pada tahun 2025.

Pembangunan manusia di Bondowoso terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2023, status pembangunan manusia Bondowoso sudah berada di level “tinggi”. Selama 2023–2025, IPM Bondowoso rata-rata meningkat sebesar 0,82 persen per tahun, dari 70.56 pada tahun 2023

Peningkatan IPM ini didorong oleh pertumbuhan positif pada ketiga dimensi dasarnya, yaitu:

- **Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat :** Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2023 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,28 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2023, UHH Bondowoso adalah 73,19 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 73,47 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,16 tahun (atau tumbuh 0,22 persen) dibanding tahun sebelumnya sebesar 73.31 tahun.
- **Dimensi Pengetahuan:** Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2023 hingga 2025, HLS Bondowoso rata-rata meningkat 0,02 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,18 persen per tahun. RLS tahun 2025 meningkat 0,01 tahun (0,15 persen) dibanding tahun 2024.

- **Dimensi Standar Hidup Layak:** Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Bondowoso mencapai Rp. 12,19 juta per tahun. Capaian ini meningkat 503 ribu rupiah (4,30 persen) dibanding tahun sebelumnya.

DIMENSI/INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025
UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT				
● Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	73,19	73,31	73,47
PENGETAHUAN				
● Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,32	13,33	13,34
● Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,36	6,53	6,54
STANDAR HIDUP LAYAK				
● Pengeluaran riil per kapita	Ribu (Rp)	11.255	11.689	12.192

**Perkembangan Dimensi Indikator Pembentuk IPM
Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025**

2. Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Bondowoso telah turun menjadi 12,20%. Angka ini setara dengan 96,71 ribu orang, berkurang sekitar 2,91 ribu jiwa dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang berada di level 12,60% atau setara dengan 99,62 ribu orang.

Tabel 2.1
Profil Kemiskinan
Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,34	12,60	12,20
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	105,13	99,62	96,71
3	Garis Kemiskinan / GK (Rupiah per kapita sebulan)	494.000	517.741	526.325
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,06	1,51	1,66
5	Indeks Keparaahan Kemiskinan (P2)	0,51	0,28	0,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso; 2026

Secara umum, dalam periode 2023-2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 105,13 ribu jiwa. berkurang sekitar 8,42 ribu jiwa menjadi 96.71 ribu jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 sebesar 13,34 persen. berkurang sebesar 1,14 persen atau menjadi 12,20 persen pada tahun 2025.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.526.325,00 per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp.32.325,00 per kapita per bulan dari sebesar Rp.494.000,00. Peningkatan Garis Kemiskinan ini terjadi diantaranya akibat peningkatan harga diberbagai komoditas, utamanya komoditas bahan makanan.

Pada periode 2023-2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan nilai dari 2,06 pada tahun 2023 menjadi 1,66 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2025 semakin mendekati dari garis kemiskinan. Begitu pula Indeks Keparaahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,51 pada tahun 2023 menjadi 0,37 pada tahun 2025 yang menunjukkan persebaran pengeluaran penduduk miskin dibawah garis kemiskinan cenderung berkurang. Meskipun P1 dan P2 mengalami penurunan namun

upaya pengentasan kemiskinan yang lebih holistik, dimana kelompok pengeluaran penduduk miskin masih beragam sehingga kebijakan yang diambil diharapkan dapat menyentuh semua kelompok tersebut.

3. Angka Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang tersedia.

Dalam kurun waktu setahun terakhir (2024-2025), pengangguran menurun sebesar 4.716 orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 1,08 persen poin menjadi 2,55 persen pada tahun 2025 (sebelumnya 3,63 persen). Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur.

Tabel 2.2
Status Keadaan Ketenagakerjaan
Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	629,9	633,1	636,2
2	Angkatan Kerja (ribu orang)	468,6	475,5	491,6
3	Bekerja (ribu orang)	449,2	458,2	479,1
4	Pengangguran (ribu orang)	19,4	17,3	12,5
5	Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	161,3	157,6	144,5
6	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	4,15	3,63	2,55
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	74,39	75,1	77,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso; 2026

Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2025 sebanyak 491,6 ribu orang, meningkat sekitar 16.139 orang dibanding tahun 2024 (475,5 ribu). Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 77,28 meningkat 2,18 persen poin dibandingkan tahun 2024 (75,10).

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 sebesar 636.159 orang, mengalami peningkatan sekitar 3 ribu orang dibandingkan tahun 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 491,6 ribu orang (77,28 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya).

Jumlah angkatan kerja tahun 2025 sebesar 491,6 ribu orang terdiri dari 479,1 ribu orang penduduk yang bekerja dan 12,5 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 23 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 29,9 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 6,9 ribu orang. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2024, jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebanyak 16,1 ribu orang. Penduduk bekerja naik sekitar 20,9 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 4,8 ribu orang.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Pendapatan Nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan



PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penggunaan "Harga Konstan" bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi (kenaikan harga), sehingga yang terukur murni adalah kenaikan volume produksi barang dan jasa.

Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp 28,56 triliun dan atas dasar

harga konstan 2010 mencapai Rp 16,65 triliun. Ekonomi Bondowoso tahun 2025 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 5,32 persen setelah sebelumnya tumbuh di tahun 2024 sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB
Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)			Distribusi (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,06	3,48	4,66	27,88	28,04	27,93
2	Pertambangan dan Penggalan	2,02	2,05	19,19	1,83	1,74	2,21
3	Industri Pengolahan	5,02	4,48	5,13	25,43	25,21	25,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,10	6,19	7,35	0,04	0,04	0,04

5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	-0,29	-0,53	0,14	0,07	0,06	0,06
6	Konstruksi	6,00	6,26	3,88	9,22	9,21	8,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,42	5,80	4,54	15,66	15,78	15,61
8	Transportasi dan Pergudangan	9,76	5,41	5,57	0,91	0,90	0,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,41	6,04	4,94	0,71	0,72	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	7,31	6,73	7,65	5,41	5,42	5,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,69	2,58	2,95	2,80	2,70	2,62
12	Real Estat	1,78	1,51	5,02	1,09	1,05	1,05
13,14	Jasa Perusahaan	6,77	6,52	10,88	0,36	0,37	0,39
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-1,28	7,55	3,30	2,86	2,95	2,90
16	Jasa Pendidikan	5,96	6,40	7,47	3,37	3,43	3,46
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,34	5,39	5,63	0,76	0,75	0,76
18,19, 20,21	Jasa Lainnya	9,59	7,10	8,53	1,61	1,64	1,74
	PDRB	4,62	4,87	5,32	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso; 2026

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu Pertambangan dan Penggalian, sebesar 19,19 persen. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 10,88 persen. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 8,53 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 7,65 persen. Lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 7,47 persen.

Struktur PDRB Bondowoso atas dasar harga berlaku tahun 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,93 persen. Selama tiga tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 27 persen. Namun, tren kontribusinya terlihat semakin naik dari tahun 2023 ke tahun 2024, sedangkan di tahun 2025 terlihat menurun.

Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Industri Pengolahan sebesar 25,21 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,61 persen; Konstruksi sebesar 8,97 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 5,44. Besaran kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ada sedikit penurunan dari tahun 2024 ke 2025. Dalam tiga tahun terakhir kontribusi konstruksi mengalami penurunan, sementara kontribusi Informasi dan Komunikasi cenderung naik. Kontribusi dari lima lapangan usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi mencapai 83,16 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2025

5. PDRB Per Kapita

Dalam statistik ekonomi wilayah, Pendapatan Per Kapita secara umum didekati menggunakan nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku karena merupakan indikator paling tersedia untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah.

PDRB Per Kapita ADHB untuk mengukur tingkat kemakmuran dan standar hidup penduduk dengan melihat nilai nominal atau rata-rata tingkat pendapatan yang benar-benar dinikmati penduduk pada tahun tersebut. Angka ini mencerminkan daya beli nominal masyarakat pada periode itu. PDRB per kapita juga digunakan untuk membandingkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup antar daerah.

Tabel 2.4
PDRB perKapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2025

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
PDRB ADHB (milyar)	24.773,36	26.543,06	28.564,52
PDRB ADHK (milyar)	15.075,62	15.809,26	16.650,57
Penduduk	788.156	792.309	796.300
PDRB perkapita ADHB	31.432.052,99	33.500.897,12	35.871.557,36
PDRB perkapita ADHK	19.127.712,21	19.953.397,13	20.909.916,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso; 2026

PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren peningkatan, mencapai Rp 35,87 juta pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup, naik dari Rp 33,50 juta pada tahun 2024.

PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso pada 2025 tumbuh 14,12 % dari tahun 2023 atau rata-rata per tahun mencapai 6,63 %. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang konsisten, rata – rata mencapai Rp 2,22 juta per tahun.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)



Rasio Gini (Gini Ratio) adalah alat ukur statistik yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan di suatu wilayah secara menyeluruh. Rasio Gini berupa koefisien yang menggambarkan derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Indikator ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi penduduk.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren penurunan atau perbaikan ketimpangan yang cukup positif dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Berikut adalah rincian perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Bondowoso:

Tahun 2023: Pada Maret 2023, Gini Ratio tercatat sebesar 0,350

Tahun 2024: Angka ini turun menjadi 0,333 pada Maret 2024,.

Tahun 2025: Tren penurunan berlanjut secara signifikan.

Maret 2025: Turun ke angka **0,271**

Angka 0,271 pada tahun 2025 merupakan tingkat ketimpangan rendah dibawah 0,3.

Keberhasilan ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan pengeluaran masyarakat secara lebih merata dibandingkan tahun-tahun pascapandemi.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya (elit), tetapi juga dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan menengah. Ketimpangan rendah

menandakan jumlah masyarakat kelas menengah yang mendominasi populasi. Hal ini

bagus bagi stabilitas ekonomi karena daya beli masyarakat tersebar merata, bukan

bertumpu pada konsumsi barang mewah oleh sekelompok orang tertentu

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai

dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Adapun mapping perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib maupun pilihan di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Perangkat Daerah Pelaksana
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Dinas Pendidikan
Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Dr. H. Koesnadi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga,Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman , Cipta Karya dan Tata Ruang
Pertanahan	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Penanaman Modal	
Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perhubungan	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian	
Statistik	
Transparansi Dan Partisipasi Publik	
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan	
Perindustrian	

URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Energi Dan Sumber Daya Minera	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Pariwisata	
Kebudayaan	
Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan	
Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kehutanan	
Energi Dan Sumber Daya Minera	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Transmigrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Manajemen Keuangan	
Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Makro	Badan Perencanaan , Pembangunan , Penelitian , dan Pengembangan Daerah
Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah	
Fasilitasi Kepala Daerah, Dprd, Dan Hubungan Antar Lembaga	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
KKPD	

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2. 6
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Terhadap LPPD tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.a.1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	97.72 %	Peserta didik : https://datadik.kemendikdasmen.go.id/manage , http://emispendis.kemenag.go.id/ Data Penduduk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bondowoso	
1.a.2		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98.58 %	Sumber Data : Peserta didik : https://datadik.kemendikdasmen.go.id/manage , http://emispendis.kemenag.go.id/ Data Penduduk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bondowoso	
1.a.3		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100.00 %	Sumber Data : Peserta didik : https://datadik.kemendikdasmen.go.id	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.a.4		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	45.54 %	Sumber Data : Peserta didik : https://datadik.kemendikdasmen.go.id	
1.a.5		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	40.75 %	Sumber Data : https://datadik.kemendikdasmen.go.id/manage	
1.b.1	Kesehatan	Persentase Kematian Ibu	0.1483 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.2		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5.9335 %	Laporan Sigizi Kesga 2025	
1.b.3		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	77.9875 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.4		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	89.4633%	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.5		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	92.8541 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.6		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.7		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai	95.2762 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		standar			
1.b.8		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %	Profil Kesehatan Tahun 2025 dan Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso	
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94.1688 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.10		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.11		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.12		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.13		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	
1.b.14		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	100 %	Profil Kesehatan Tahun 2025	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar			
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	46.7470 %		
1.c.2		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	67.5814 %		
1.c.3		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	82.7642 %		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum
1.c.4		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84.8564 %		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.c.5		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	100 %		Infrastruktur pengendali banjir berada di wilayah sungai, yang mana wilayah sungai bukan kewenangan kabupaten melainkan kewenangan provinsi
1.c.6		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100 %		Kabupaten Bondowoso tidak memiliki laut / wilayah pantai.
1.c.7		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100 %		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota
1.c.8		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100 %		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah
1.c.9		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8.2411 %		
1.c.10		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	100 %		Jumlah Penilaian KKPR yang terbit

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota			
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100 %		
1.d.2		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	48.9935 %		
1.d.3		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	21.6824 %		
1.d.4		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 %		
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33 %		
1.e.2		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	100 %	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja			
1.e.3		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100 %	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja	
1.e.4		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		
1.e.5		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %		
1.e.6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	22.8070 %	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja	
1.f.1	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	6.9268 %		Bantuan berupa alat mobilitas, sembako, uang dan kewirausahaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.f.2		Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	10.2675 %		Bantuan berupa Perlengkapan Sekolah, Sembako, Alat Bantu Mobilitas dan Uang
1.f.3		Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	15.4164 %		Pemberian Bantuan Berupa Sandang, Sembako, Nutrisi , Alat Mobilitas dan Sarana Kamar
1.f.4		Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %		Pemberian Sembako
1.f.5		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100 %		Jumlah Korban bencana alam, sosial dan/atau non alam 91, Jumlah Korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 91, sehingga persentase Korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Tahun 2025 sebesar 100%

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.f.6		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0.3589 %		Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi sebanyak 1642.
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100 %		
2.a.2		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	12.1176 %		
2.a.3		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100.0130 %		Target : 23.000 Orang Realisasi : 23.003 Orang (lebih 3 orang karena menggantikan 3 orang sebelumnya yang meninggal dunia) data lengkap di link https://drive.google.com/file/d/

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					1oysKftgk6hSPOVSePqPgIDwYUPztfEHR/view?usp=sharing
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		Jumlah Kasus Anak 58, sesuai dengan Kasus Anak yang terlayani Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) huruf b, d, f, h, i, j, dan m Jumlah Anak 213.640 sesuai dengan jumlah anak data Bondowoso Dalam Angka Tahun 2025 Presentase ratio kekerasan terhadap anak yang telah dilayani adalah sebesar 100%
2.b.2		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		Jumlah Kasus Perempuan sebanyak 28 kasus sesuai dengan Kasus Perempuan yang terlayani (Dokumen Pendukung Terlampir) Jumlah Perempuan (Usia di atas 19 Tahun) sebanyak 296.810 sesuai dengan jumlah data

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Bondowoso Dalam Angka Tahun 2025 (Dokumen Terlampir) Presentase kasus Perempuan yang dilayani sebanyak 100%, sebagaimana keterangan terlampir
2.c	Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20.73 %		
2.d.1	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	100 %		
2.d.2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	100 %		Pada Indikator Kinerja Makro Pertanahan yaitu Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada pelaksanaan analisa penilaian perwujudan Rencana Pola Ruang pada Rencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tata Ruan
2.d.3		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	20 %		
2.e.1	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %		
2.e.2		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	22.3390 %		
2.f.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	97.8343 %	Akta Kelahiran 0-17 Tahun	
2.f.2		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	47.61 %	Kartu Identitas Anak	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.f.3		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100 %	data profil kependudukan	
2.f.4		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98.7442 %	Perekaman KTP-el	
2.f.5		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Akta Kematian	
2.f.6		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Akta Perkawinan	
2.f.7		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	Akta Perceraian	
2.g.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100 %		Sudah tidak ada lagi desa tertinggal di kabupaten bondowoso sejak tahun 2020
2.g.2		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	13.5135 %		
2.g.3		Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.h.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	100 %		Berdasarkan Renstra Dinas Sosial P3AKB target Total Fertility Rate (TFR) Bondowoso tahun 2025 = 2 %. Sesuai IKU (Indikator Kinerja Utama) BKKBN diperoleh TFR Bondowoso tahun 2025 = 2,00 %. Jadi capaian TFR Bondowoso tahun 2025 sebesar 100 %, sebagaimana bukti terlampir
2.h.2		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	73.8858 %		Berdasarkan Renstra Dinas Sosial P3AKB target prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) tahun 2025 = 81,3 %. Sesuai perhitungan rumus diperoleh angka mCPR 2025 sebesar 73,89 %. Jadi realisasi capaian mCPR (prosentase pemakaian kontrasepsi modern) tahun 2025 sebesar 91 %.
2.h.3		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	120 %		Berdasarkan Renstra DSP3AKB 2025 target UnmetNeed = 2,5 %. Berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) BKKBN diperoleh Unmetneed

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Bondowoso tahun 2025 = 3,00 %. Jadi capaian UnmetNeed tahun 2025 Kabupaten Bondowoso sebesar 120 %
2.i.1	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	100 %		
2.i.2		Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,377		
2.i.3		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100 %		Di Kabupaten Bondowoso belum terdapat perusahaan angkutan yang memiliki izin terutama yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan
2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		
2.j.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.j.3		online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0.6954 %		
2.k.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1.0647 %		
2.k.2		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	97.2399 %		
2.l.1	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	-47.7736 %	https://drive.google.com/file/d/1qb4sGzE_EPp7Algn u0ZN-65Bx0qa0ZHr/view?usp=drive_link	Nilai investasi tahun N = 667.668.587.747 Nilai investasi tahun N-1 = Rp 1.278.411.800.000
2.l.2		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	52.2092 %	https://drive.google.com/file/d/1nSP3hNBwKz5Yuai TepNE487g1atF_nnR/view?usp=drive_link	nilai investasi rendah krn : 1. Hambatan Struktural Integrasi RDTR Sistem OSS-RBA, 2. Dampak Volatilitas Ekonomi & Kebijakan Moneter Ketidakpastian ekonomi global.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	430 %		
2.m.2		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	13.98 %		
2.m.3		Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0 %		
2.m.4		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	100 %		
2.n	Statistik	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	100 %		
2.o	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	70.0436 %		
2.p.1	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	73.2323 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.p.2		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	145.6118 %		
2.q.1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	56,47		
2.q.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	6,22		
2.r	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	52,32%		
3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	100.1294 %		Produksi perikanan tahun 2025 tercapai 100.1294 % atau meningkat dibandingkan tahun 2024
3.a.2		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	43,06		Angka Konsumsi Ikan (AKI) tercapai 100,36 % dari target 21,72 kg/kap/tahun terealisasi 20,80 kg/kap/tahun
3.b.1	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	3.9917 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.b.2		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	40.0984 %		
3.b.3		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	12.6355 %		
3.c.1	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	20.1759 %		
3.c.2		Persentase peningkatan produksi hortikultura	3.0521 %		
3.c.3		Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	62.1402 %		Produksi Komoditas Peternakan tahun 2025 meningkat sebesar 62,1402 % dari tahun 2024
3.c.4		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	44.3714 %		Terjadinya peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal Tahun 2025 dikarenakan persediaan vaksin tahun 2024 Expired Date (kadaluwarsa), pada pertengahan 2025 kasus PMK mulai melandai dan dapat ditangani
3.d.1	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang	8.8291 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berlaku			
3.g.1	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	30 %		
3.g.2		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi	0.0014 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		melalui Sistem Informasi Industri Nasional			
3.g.3		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	0.7352 %		
3.g.4		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	7.0814 %		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Fungsi Penunjang
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Terhadap LPPD Tahun 2025

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.a.1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100 %	Perubahan RKPD 2025 dan Perubahah APBD 2025	
4.b.1	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru,	36.6708 %		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya			
4.b.2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	15.2841 %		
4.b.3		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	63.8231 %		
4.b.4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	28.3776 %		
4.c	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53.7241 %		
4.e.1	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4		Hasil Evaluasi BPKP Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,448 (Level 2). Maka nilai capaian adalah 4
4.e.2		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5		Kapabilitas APIP Level 3 = nilai capaian 5
4.e.3		Manajemen risiko Indeks	4		Hasil Evaluasi BPKP Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,017 (Level 2). Maka nilai capaian adalah 4

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.e.4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	90.4915 %		Sesuai Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur
4.f.1	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00		
4.f.2		Pemanfaatan sistem pengadaan	20,66		
4.f.3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	12,00		
4.g.1	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Ya		
4.g.2		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	160 %		
4.h	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	87,53		urat dari Ombudsman RI Nomor : R/3210/PC.02/XI/2024 tanggal 6 Nopember 2024 Hal : Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Kabupaten Bondowoso. Untuk Tahun 2025 Kabupaten Bondowoso tidak

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dilakukan Penilaian oleh Ombudsman RI (di Provinsi Jatim hanya sebagian Kab/Kota saja yang dilakukan penilaian)
4.d	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100 %	Output Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja yang disajikan setelah terdapat penyesuaian dengan Perubahan RKPD 2025 dan KU P-APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara Merata Berbasis Potensi Lokal	1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi	4,88%
		2. Indeks Gini	0,329
		3. Persentase Tingkat Kemiskinan	12%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	79,84
3	Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia	71,95
4	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,43
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	6
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya	8. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	N/A
7	Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Inklusif dan Berkelanjutan	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,46

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029.

Kerangka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dimana dalam penarikan kesimpulan terhadap kategori capaian kinerja mengacu skala ordinal dari Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cara pengukuran kinerja diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

- 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2 Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 3 Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis dikategorikan sesuai dengan rentang capaian, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Kategori Penilaian Capaian Kinerja

Rentang Capaian	Kategori
Capaian $\geq$ 100%	Memuaskan
$85 \leq$ Capaian $<$ 100	Sangat Berhasil
$70 \leq$ Capaian $<$ 85	Berhasil
$55 \leq$ Capaian $<$ 70	Cukup Berhasil
Capaian $<$ 55	Kurang Berhasil

Adapun capaian indikator sasaran strategis yang sudah ditetapkan berdasarkan target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET/CAPAIAN 2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara Merata Berbasis Potensi Lokal									
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	4,62%	4,87%	4,88%	5,32%	109,02%	Memuaskan	5,05%	105%
2	Indeks Gini	0,350	0,333	0,36	0,271	123,66%	Memuaskan	0,305	111%
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	13,34%	12,60%	12,00%	12,20%	101,67%	Memuaskan	10	198,78%
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan)									
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah									
Sasaran 4 : Meningkatnya Wirausaha Baru									
Sasaran 5 : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa									
Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial									
Sasaran 7 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja									
4	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,15%	3,63%	3,43%	2,55%	125,66%	Memuaskan	2,82%	109,57%
Sasaran 8 : Meningkatnya Ketahanan Pangan									
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik									
5	Indeks Reformasi Birokrasi	66,30	79,05	79,84	81,64	102,25%	memuaskan	83,5	97%
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah									
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia									
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,56	71,22	71,95	71,72	99,68%	Sangat Berhasil	73,71	97%
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat									
Sasaran 12 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat									
Sasaran 13 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda									
Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk									
Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan									
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	N/A	6	7,4	123,33%	memuaskan	7,2	103%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET/CAPAIAN 2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Sasaran 15 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah Secara Merata									
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya									
8	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	50,2	
Sasaran 16 : Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan									
Sasaran 17 : Meningkatkan Toleransi Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan									
Sasaran 18 : Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban, serta Perlindungan Terhadap Masyarakat									
Tujuan 6 : Meningkatkan Lingkungan Hidup Yang Inklusif dan Berkelanjutan									
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,76	67,65	73,46	72,85	99,17%	Sangat Berhasil	73,77	99%
Sasaran 19 : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman									
Sasaran 20 : Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
Sumber : Badan Pusat Statistik, Bondowoso Dalam Angka Tahun 2026 dan Perangkat Daerah terkait									

3. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

1 Capaian Kinerja Tujuan 1 Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara Merata Berbasis Potensi Lokal.

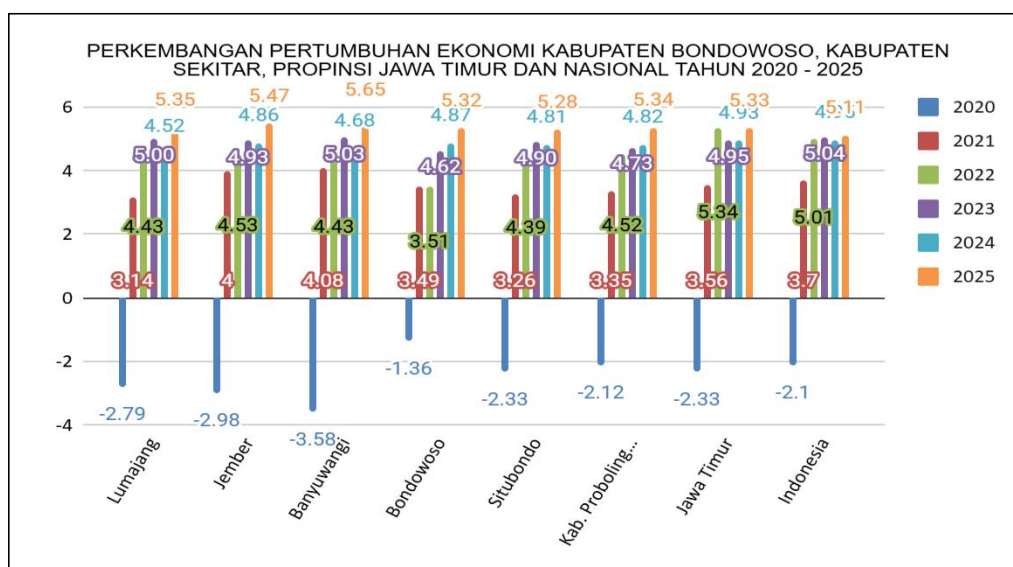
Kinerja Tujuan Terwujudnyssa pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Persentase Tingkat Kemiskinan dan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 8 (Delapan) Sasaran yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan)
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah
4. Sasaran 4 : Meningkatnya Wirausaha Baru
5. Sasaran 5 : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa
6. Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
7. Sasaran 7 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
8. Sasaran 8 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Secara Merata Berbasis Potensi Lokal Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET/CAPAIAN 2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD (2029)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara Merata Berbasis Potensi Lokal									
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	4,62%	4,87%	4,88%	5,32%	109,02%	Memuaskan	5,05%	105%
2	Indeks Gini	0,350	0,333	0,36	0,271	123,66%	Memuaskan	0,305	111%
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	13,34%	12,60%	12,00%	12,20%	101,67%	Memuaskan	10	198,78%
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan)									
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah									
Sasaran 4 : Meningkatnya Wirausaha Baru									
Sasaran 5 : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa									
Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial									
Sasaran 7 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja									
4	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,15%	3,63%	3,43%	2,55%	125,66%	Memuaskan	2,82%	109,57%
Sasaran 8 : Meningkatnya Ketahanan Pangan									

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bondowoso Dalam Angka Tahun 2026



Sumber : Propinsi Jawa Timur dalam Angka 2026

Pertumbuhan ekonomi Bondowoso dari 2023 ke 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, Bondowoso berhasil keluar dari zona pemulihan pasca-pandemi dengan pertumbuhan 4,62%. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Dominasi Pertanian: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 28% terhadap PDRB.
- Konsumsi Rumah Tangga: Daya beli masyarakat yang terjaga menyumbang kontribusi terbesar dari sisi pengeluaran (lebih dari 76%).
- Ijen Geopark: Status *UNESCO Global Geopark* mulai menarik kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara secara signifikan.

Pada tahun 2024, peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh pembangunan infrastruktur distribusi, yaitu pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi kopi dan tembakau ke jalur distribusi utama mempercepat perputaran barang. Selain itu, juga dilakukan digitalisasi UMKM, dimana pemerintah daerah mulai mendorong pelaku usaha lokal masuk ke ekosistem digital, yang terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar.

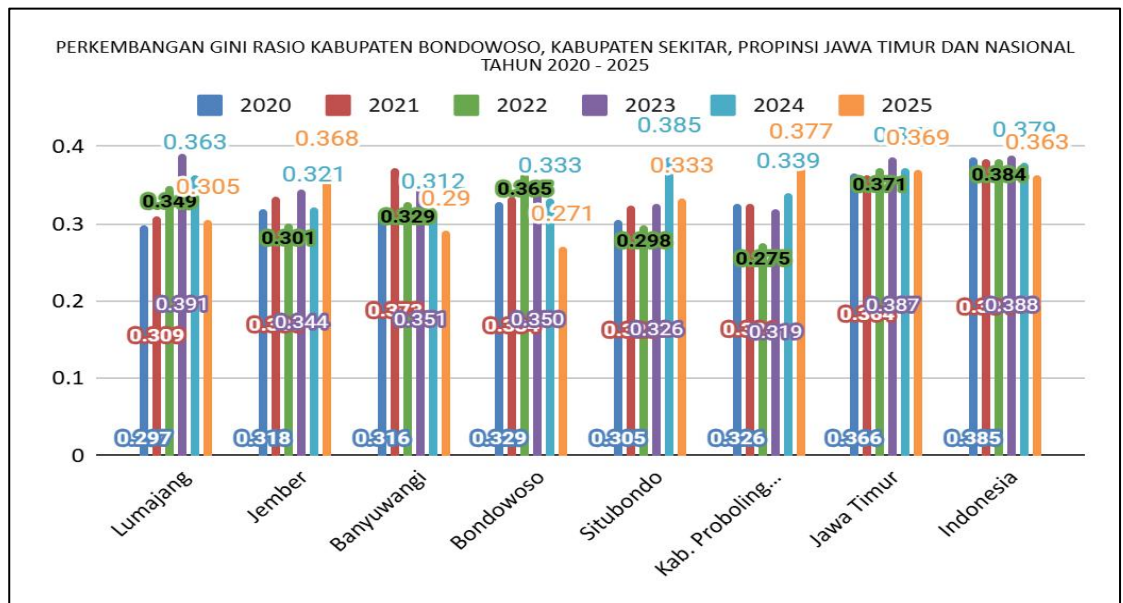
Memasuki tahun 2025, pertumbuhan bergerak dinamis. Meskipun sempat menyentuh angka yang lebih tinggi di pertengahan tahun (Q3), stabilitas di angka **5,2%** pada Triwulan IV mencerminkan ekonomi yang lebih "matang" dan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Hilirisasi Produk Unggulan: Melalui *Festival Kopi Nusantara ke-8*, Bondowoso tidak lagi hanya menjual biji kopi mentah, tapi juga produk olahan dengan nilai tambah tinggi. Kontrak dagang yang dihasilkan mencapai miliaran rupiah.
- Bondowoso Investment Gathering: Strategi "Investasi Hijau" berhasil menarik investor yang fokus pada energi terbarukan dan agribisnis berkelanjutan.
- Stabilitas Harga Pangan: Kemampuan pemda dalam menjaga inflasi (terutama harga beras dan kebutuhan pokok) memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain :

1. Program Penyuluhan Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Pengembangan Ekspor
7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

10. Program Pemasaran Pariwisata
11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
13. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
14. Program Pelayanan Penanaman Modal
15. Program Pengembangan UMKM
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)



Sumber : Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2026

Penurunan Indeks Gini Bondowoso dari 0,35 pada tahun 2023 menjadi 0,271 pada tahun 2025 adalah pencapaian yang sangat signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa Bondowoso berhasil mengubah arah pembangunan dari sekadar "tumbuh cepat" menjadi "tumbuh merata". Angka tersebut menjadi pencapaian terbaik Kabupaten Bondowoso jika dibandingkan wilayah lain di kawasan daerah Tapal Kuda, wilayah Propinsi Jawa Timur dan Nasional.

Pada tahun 2023, kondisi ketimpangan di Kabupaten Bondowoso berada di angka 0,35 (Ketimpangan Sedang). Hal tersebut terjadi karena ;

- Kondisi: Sebagian besar kue ekonomi masih dinikmati oleh sektor perdagangan besar di pusat kota.
- Tantangan: Petani di pelosok desa masih menghadapi kendala logistik dan harga jual yang fluktuatif, sehingga selisih pendapatan antara masyarakat urban dan rural masih cukup terasa.

Pada tahun 2024, kondisi ketimpangan di Kabupaten Bondowoso berada di angka 0,33. Tahun 2024 menjadi masa transisi di mana pemerintah daerah mulai menggeser fokus ke pinggiran. Penurunan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso terjadi karena beberapa hal berikut :

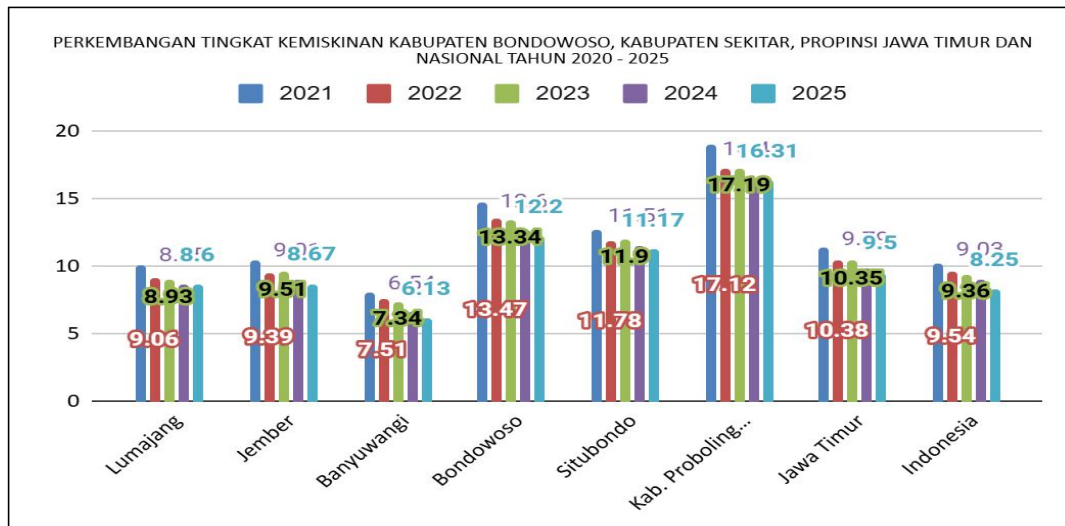
- Pendampingan masif terhadap UMKM di tingkat desa membuat masyarakat berpenghasilan rendah memiliki sumber pendapatan baru di luar sektor pertanian buruh.
- Perbaikan Aksesibilitas yaitu pembangunan jalan desa ke sentra produksi untuk mengurangi peran tengkulak, sehingga margin keuntungan lebih banyak jatuh ke tangan petani kecil, bukan hanya pedagang besar.

Memasuki akhir tahun 2025, kondisi ketimpangan di Kabupaten Bondowoso berada di angka 0,271. Angka tersebut mencerminkan pemerataan pendapatan yang sangat stabil. Faktor utamanya adalah:

- Pariwisata Berbasis Masyarakat: Pengelolaan *Ijen Geopark* tidak hanya melibatkan investor besar, tetapi juga kelompok sadar wisata (Pokdarwis) desa. Uang dari turis masuk langsung ke kantong penyedia jasa *homestay*, pemandu lokal, dan pengrajin suvenir di desa-desa.
- Hilirisasi Pertanian (Kopi & Tembakau): Beroperasinya pusat-pusat pengolahan kopi di tingkat kecamatan memungkinkan petani menjual produk dalam bentuk olahan (*roasted*) yang harganya jauh lebih mahal dibanding biji mentah (*green bean*). Ini meningkatkan kelas ekonomi petani kecil secara drastis.
- Efektivitas Jaring Pengaman Sosial: Penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat (tepat sasaran) di Bondowoso berhasil menjaga daya beli kelompok masyarakat paling bawah, sehingga mereka tidak tertinggal jauh saat ekonomi kabupaten melesat.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
4. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
5. Program Pemberdayaan Sosial
6. Program Perlindungan dan Jaminan SosialProgram Rehabilitasi Sosial



Sumber : Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2026

Penurunan angka kemiskinan Bondowoso dari 13,34% (2023) menjadi 12,2% (2025) bukan sekadar perubahan angka, melainkan indikator bahwa strategi pertumbuhan inklusif yang dijalankan mulai membuahkan hasil nyata. Penurunan sebesar 1,14% dalam kurun waktu dua tahun di wilayah dengan karakteristik agraris yang kuat adalah pencapaian yang cukup agresif.

Perbandingan efisiensi penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bondowoso dengan beberapa wilayah di Tapal Kuda. Meskipun secara angka mutlak Banyuwangi lebih rendah, namun laju penurunan Bondowoso dianggap lebih impresif karena memulainya dari angka yang jauh lebih sulit (dua digit tinggi).

Perbandingan kualitas penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bondowoso dengan beberapa wilayah di Tapal Kuda. Hal yang menarik adalah, Bondowoso menurunkan kemiskinan sekaligus menurunkan ketimpangan (Gini Index). Di wilayah lain, terkadang kemiskinan turun tapi ketimpangan naik. Bondowoso berhasil menghindari jebakan itu.

Berikut adalah analisis strategis mengenai faktor-faktor yang mendorong tren positif tersebut :

- 1 Sinkronisasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Secara teori, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menurunkan kemiskinan jika tidak merata. Namun, di Bondowoso, kenaikan pertumbuhan ekonomi ke 5,2% berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan.
 - Artinya: Pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja lapisan bawah, seperti pertanian dan perdagangan skala mikro.

- Efek Pengganda: Peningkatan pendapatan di sektor pertanian langsung berdampak pada daya beli rumah tangga miskin, mengingat mayoritas penduduk miskin di Bondowoso bekerja di sektor ini.
- 2 Hilirisasi Pertanian: Dari "Buruh" Menjadi "Pengusaha" Bondowoso berhasil menggeser paradigma dari sekadar menjual komoditas mentah menjadi produk olahan.
- Klaster Kopi & Tembakau: Program bantuan alat pengolahan pasca-panen kepada kelompok tani memungkinkan petani kecil mendapatkan nilai tambah (*value-added*). Petani yang dulunya hanya buruh petik kini mulai terlibat dalam proses pengolahan, yang memberikan margin keuntungan lebih tinggi.
 - Pertanian Organik: Pengembangan padi organik di beberapa kecamatan memberikan harga jual yang lebih stabil dan tinggi, melindungi petani dari fluktuasi harga komoditas pangan biasa.
- 3 Optimalisasi Ijen Geopark sebagai Mesin Ekonomi Baru
- Status UNESCO Global Geopark pada Ijen tidak hanya menarik wisatawan, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi di desa-desa penyangga.
- Pariwisata Berbasis Masyarakat: Munculnya *homestay* milik warga, jasa pemandu lokal, dan warung-warung rakyat di jalur wisata telah mendiversifikasi sumber pendapatan warga desa. Ini sangat efektif mengangkat mereka yang sebelumnya berada sedikit di bawah garis kemiskinan (kelompok rentan).
- 4 Presisi Program Jaring Pengaman Sosial Salah satu kunci utama penurunan kemiskinan adalah ketepatan sasaran bantuan.
- Pemanfaatan Data Makro & Mikro: Pemerintah daerah Bondowoso terlihat lebih disiplin dalam memverifikasi data kemiskinan ekstrem. Dengan data yang lebih akurat, program seperti bedah rumah, bantuan modal usaha, dan subsidi pendidikan tepat menysasar keluarga yang benar-benar membutuhkan.
- 5 Stabilitas Harga Pangan Lokal Bagi masyarakat miskin, komponen pengeluaran terbesar adalah makanan.
- Pengendalian Inflasi: Kemampuan Pemda dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar-pasar tradisional melalui operasi pasar yang rutin sangat membantu menjaga agar warga tidak kembali jatuh di bawah garis kemiskinan akibat kenaikan harga bahan pokok.

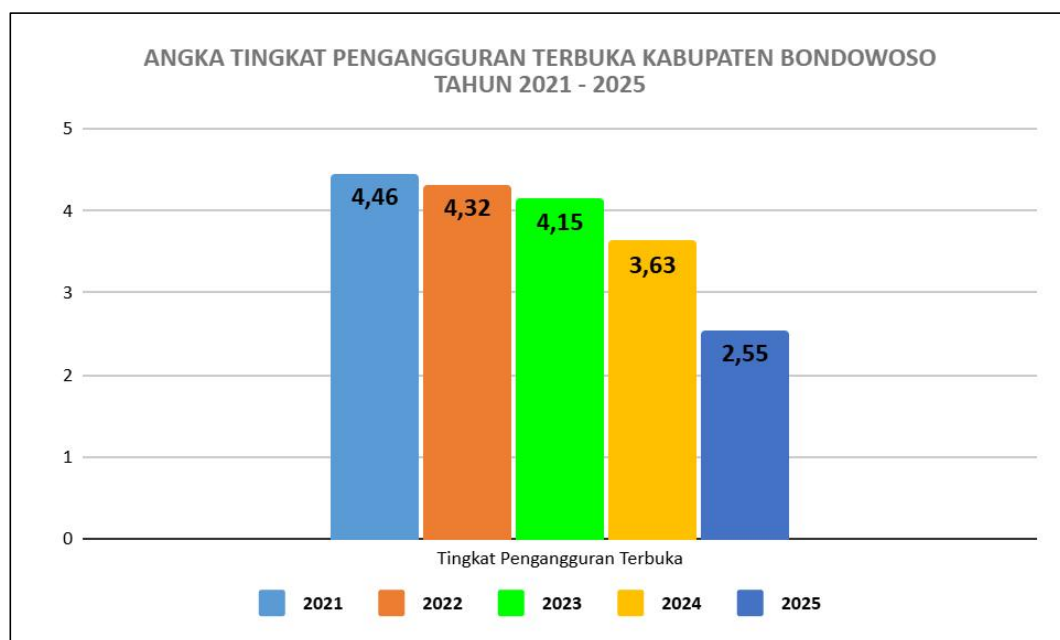
Penurunan tingkat kemiskinan ke angka 12,2% menunjukkan bahwa Bondowoso mulai berhasil memutus rantai kemiskinan struktural. Tantangan berikutnya pada 2026 adalah mencapai angka satu digit. Untuk mencapai itu, diperlukan konsistensi dalam

menjaga iklim investasi dan memastikan digitalisasi merambah ke UMKM di pelosok desa.

Tantangan ke depan adalah menjaga agar warga yang sudah mentas dari kemiskinan tidak jatuh kembali (vulnerable) jika terjadi guncangan ekonomi global. Apalagi di Triwulan 1 Tahun 2026 terjadi perang antara Amerika - Israel melawan Iran yang dapat mempengaruhi perekonomian dunia, dimana dengan ditutupnya selat Hormuz Iran sebagai jalur utama perdagangan minyak dunia mengakibatkan harga minyak melambung dan ketersediaan minyak menjadi terbatas. Apabila hal tersebut terus berlanjut, akan mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari ikut merangkak naik.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan



Sumber : Kabupaten Bondowoso dalam Angka; 2026

Capaian Kinerja Tujuan 2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

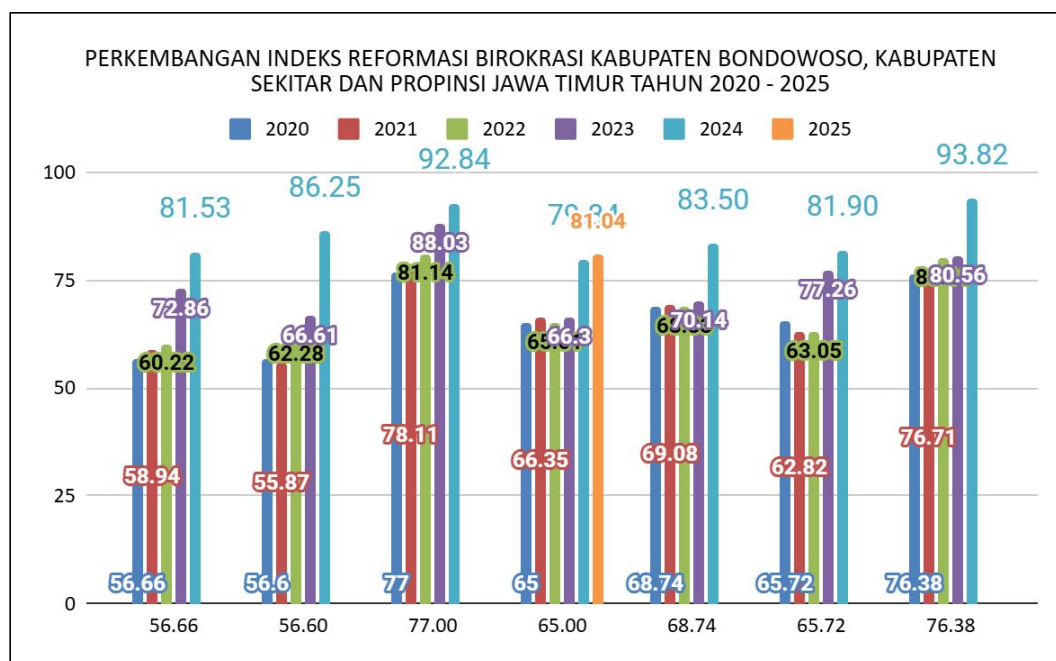
Tabel 2.12

**Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024		TARGET/CAPAIAN 2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
5	Indeks Reformasi Birokrasi	66,30	79,05	79,84	81,64	102,25%	memuaskan	83,5	97%	
Sasaran 9 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah										
Sasaran 10 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik										

Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 2 (Dua) Sasaran yaitu :

1. Sasaran 9: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah
2. Sasaran 10: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Sumber : Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur Tahun 2026

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bondowoso yang melonjak tajam dari 66,30 (2023) menjadi 81,64 (2025) adalah sebuah "lompatan kelas" yang luar biasa. Secara administratif, angka 81,64 menempatkan suatu daerah pada kategori "A" (Sangat Baik/Memuaskan).

Lompatan sebesar 14,74 dalam dua tahun menunjukkan bahwa Bondowoso telah berhasil melakukan transformasi dari birokrasi yang sekadar "mengikuti aturan" menjadi birokrasi yang "berorientasi hasil dan pelayanan".

Berikut adalah analisis mendalam mengenai mesin penggerak di balik kenaikan signifikan tersebut:

1. Transformasi Digital: SPBE yang Terintegrasi

Kenaikan indeks RB sangat dipengaruhi oleh penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- Analisis: Pada 2023, sistem mungkin masih tersegmentasi (ego sektoral). Namun di 2025, Bondowoso berhasil mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik ke dalam satu ekosistem digital. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian Indeks SPBE yang terus mengalami kenaikan dari Tahun 2023 dengan indeks SPBE 2,9 (Baik), Tahun 2024 indeks SPBE 3,86 (Sangat Baik) dan Tahun 2025 dengan indeks SPBE 3,87 (Sangat Baik).
- Dampak: Proses perizinan, administrasi kependudukan, hingga sistem keuangan daerah menjadi lebih transparan dan cepat

2. Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Salah satu pilar berat dalam RB adalah penataan SDM Aparatur, Sampai dengan akhir tahun 2025 Kabupaten Bondowoso memperoleh capaian Indeks Sistem Merit dengan indeks 247 (kurang). Angka 247 masuk dalam kategori "Kurang" (meskipun hanya terpaut 3 poin saja dari kategori "Baik" yang dimulai di angka 250).

Angka tersebut menghadirkan sebuah analisis kontras yang menarik. Di satu sisi, Bondowoso menunjukkan performa gemilang di sektor ekonomi dan reformasi birokrasi secara umum (81,64), namun di sisi lain, Indeks Sistem Merit di angka 247 menunjukkan adanya "sumbatan" dalam manajemen sumber daya manusia aparatur. Ini adalah sinyal bahwa transformasi birokrasi di Bondowoso baru menyentuh aspek layanan dan sistem, namun belum sepenuhnya merombak budaya kerja dan manajemen karier ASN secara fundamental.

- Berikut adalah analisis mendalam mengenai titik lemah dan tantangan yang dihadapi:
Sistem Merit dinilai berdasarkan 8 aspek manajemen ASN. Dengan skor 247, kemungkinan besar Bondowoso mengalami kendala pada pilar-pilar berikut:
- Manajemen Talenta & Rencana Suksesi: Ini sering menjadi titik terlemah. Jika pengisian jabatan masih didominasi oleh sistem "antrean" atau pertimbangan subjektif ketimbang basis data talenta (*talent pool*), skor akan sulit naik.

- Pemetaan Kompetensi (Assessment Center): Belum masifnya penggunaan *assessment center* untuk memetakan kompetensi manajerial dan teknis ASN menjadi hambatan besar.
- Integrasi e-Kinerja dengan Karier: Meskipun sudah memiliki sistem kinerja digital, jika hasilnya belum dijadikan dasar utama dalam mutasi, promosi, dan pemberian penghargaan, maka poin sistem merit akan tertahan.
- Dampak : Sistem Merit yang rendah memiliki risiko jangka panjang bagi tren positif Bondowoso antara lain:
- Risiko Inkompetensi: Jika penempatan pejabat di dinas strategis (seperti Dinas Penanaman Modal atau Pertanian) tidak berdasarkan kompetensi terbaik (Merit), maka inovasi bisa terhenti.
- Demotivasi ASN Muda: ASN berprestasi mungkin merasa tidak memiliki jalur karier yang jelas, yang bisa menurunkan kualitas pelayanan publik di masa depan.
- Indeks Sistem Merit sebesar 247 adalah **"pekerjaan rumah"** untuk menyempurnakan era keemasan Bondowoso di tahun 2025. Jika masalah manajemen ASN ini bisa diselesaikan, maka pertumbuhan ekonomi 5,2% dan penurunan kemiskinan akan didukung oleh mesin birokrasi yang jauh lebih tangguh dan profesional.

3. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang Lebih Efektif

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah wajah nyata dari reformasi birokrasi.

- Analisis: Peningkatan sarana dan prasarana di MPP Bondowoso membuat masyarakat merasakan kemudahan nyata. Integrasi layanan antara instansi vertikal (Polri, Pajak, Imigrasi) dengan instansi daerah mempercepat waktu tunggu secara drastis.
- Dampak: Masyarakat dan pelaku usaha merasa lebih nyaman, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai investasi yang kita bahas sebelumnya.

4. Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) yang Tajam

Indeks RB sangat berkaitan erat dengan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai SAKIP Kabupaten Bondowoso periode 2023–2025 memberikan perspektif yang menarik sekaligus menjadi "lampu kuning" di tengah gemerlap prestasi indikator lainnya. Meskipun secara keseluruhan skor 74,11 di tahun 2025 masih menempatkan Bondowoso pada predikat "BB" (Sangat Baik), tren penurunan dari 74,77 di tahun 2023 menjadi 74,11 di tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas manajemen kinerja.

- Beberapa Analisis penyebab penurunan nilai SAKIP antara lain:

1. Titik Lemah Utama: Perencanaan Kinerja (skor 24,72 → 23,99)

Aspek perencanaan adalah "hulu" dari seluruh siklus SAKIP. Penurunan di sektor ini adalah sinyal bahwa terjadi pelemahan pada pondasi strategi organisasi.

- Analisis: Penurunan ke angka 23,99 menunjukkan adanya ketidakselarasan (*misalignment*) antara target besar kabupaten dengan program kerja di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Penyebab Kemungkinan: Terjadi fenomena "Copy-Paste" perencanaan tahun sebelumnya yang tidak lagi relevan dengan dinamika ekonomi 2025, atau indikator kinerja (KPI) yang ditetapkan kurang tepat sehingga sulit dieksekusi oleh unit kerja terkecil.

2. Paradoks: Ekonomi Melesat, SAKIP Melambat

Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,2% dan Indeks RB naik ke 81,64, tetapi nilai SAKIP turun.

- Efisiensi vs Efektivitas: Kenaikan Indeks RB (81,64) menunjukkan birokrasi sudah lebih efisien (digitalisasi, layanan cepat). Namun, penurunan SAKIP menunjukkan birokrasi diharapkan mampu memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak maksimal bagi target kinerja daerah.
- "Success by Accident" vs "Success by Design": Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mungkin dipicu oleh faktor eksternal (harga komoditas kopi naik, kunjungan wisata Ijen naik), namun SAKIP yang turun menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang mampu melakukan perencanaan yang matang untuk mengkapitalisasi momentum tersebut secara sistematis.

3. Risiko "Cascading" yang Terputus

Penurunan pada aspek perencanaan biasanya berdampak pada Cascading Kinerja.

- Analisis: Visi Bupati/Daerah mungkin sangat bagus, tetapi ketika diturunkan menjadi sasaran strategis di tingkat Dinas, maknanya menjadi kabur. Skor 23,99 mengindikasikan bahwa banyak pegawai yang bekerja keras, namun tidak sepenuhnya memahami apakah pekerjaan mereka berkontribusi langsung pada penurunan kemiskinan atau peningkatan IPM secara efektif.

Strategi Perbaikan (Road Map untuk menjadi 75.00+ / Predikat A)

Untuk membalikkan keadaan dan mengejar predikat "A", Bondowoso perlu melakukan "Ramu Ulang Perencanaan":

- Revisi Indikator Kinerja: Fokus pada sedikit indikator tapi berdampak besar (*less is more*), daripada banyak indikator tapi hanya bersifat administratif.
- Penguatan Pohon Kinerja: Memastikan setiap OPD memiliki hubungan yang jelas antara anggaran yang dikeluarkan dengan target *outcome* daerah (misal: anggaran jalan harus jelas berapa persen kontribusinya pada kenaikan harga jual kopi petani).
- Sinkronisasi RB dan SAKIP: Memanfaatkan sistem digital Aplikasi AKSELERASI Bondowoso yang sudah bagus untuk memantau capaian kinerja secara *real-time*, bukan hanya di akhir tahun.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan
8. Program Pencatatan Sipil
9. Program Pendaftaran Penduduk

2 Capaian Kinerja Tujuan 3 Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia

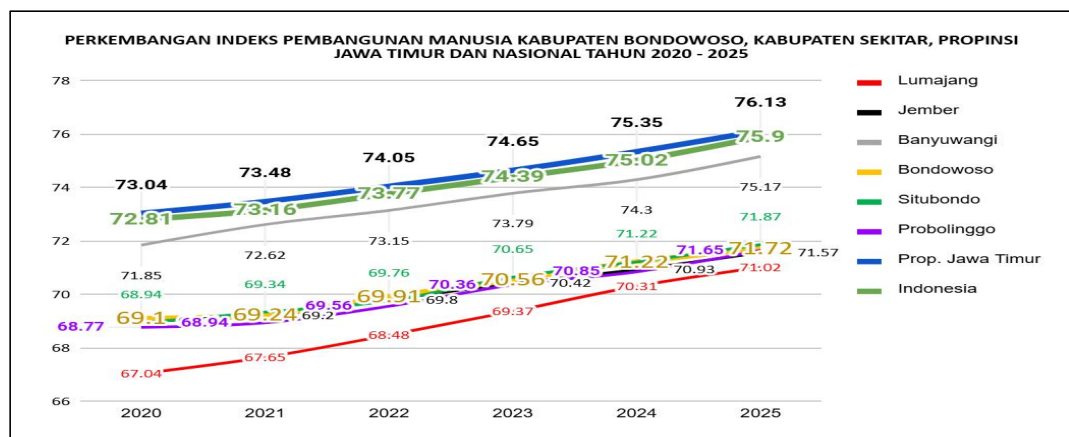
Tabel 2.13
Capaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET/CAPAIAN 2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia									
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,56	71,22	71,95	71,72	99,68%	Sangat Berhasil	73,71	97%
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat									
Sasaran 12 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat									
Sasaran 13 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda									
Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk									

Sumber : Propinsi Jawa Timur dalam Angka 2026

Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 4 (Empat) Sasaran yaitu:

1. Sasaran 11: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat
2. Sasaran 12: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Sasaran 13 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda
4. Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber : Propinsi Jawa Timur dalam Angka 2026

Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso dari 70,56 (2023) menjadi 71,72 (2025) menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mempertahankan posisinya di kategori "Tinggi" (skor >70). Peningkatan sebesar 1,16 poin dalam dua tahun adalah progres yang sangat progresif bagi wilayah agraris. Hal ini menandakan bahwa investasi pemerintah daerah pada "orang" (manusia) mulai memberikan imbal hasil yang nyata, bukan sekadar membangun fisik bangunan saja.

Berikut analisis dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso:

1. Umur Harapan Hidup (Dimensi Kesehatan)

Analisis terhadap Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bondowoso periode 2023–2025 memberikan gambaran yang menenangkan. Kenaikan dari 73,19 tahun pada 2023 menjadi 73,47 tahun pada 2025 menunjukkan bahwa masyarakat Bondowoso kini memiliki kualitas kesehatan dan lingkungan yang semakin menunjang umur panjang.

- Analisis: Penurunan angka stunting yang masif di Bondowoso dan peningkatan akses layanan kesehatan melalui Puskesmas yang terakreditasi menjadi faktor kunci.
 - Dampak: Masyarakat Bondowoso hidup lebih sehat dan memiliki umur harapan hidup yang lebih panjang berkat ketersediaan sanitasi yang lebih baik dan jaminan kesehatan daerah yang lebih merata.
2. Harapan Lama Sekolah & Rata-rata Lama Sekolah (Dimensi Pengetahuan)

HLS (Harapan Lama Sekolah) adalah sinyal penting mengenai "investasi masa depan" karena mencerminkan berapa lama anak-anak di Bondowoso diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal. Meskipun Harapan Lama Sekolah (HLS) sudah tinggi (13+ tahun), Bondowoso masih memiliki tantangan pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk dewasanya yang secara historis masih berada di bawah 7 tahun (setara kelas 1 SMP).

- Analisis: Program percepatan wajib belajar dan beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu mulai membuahkan hasil, selain itu Kabupaten Bondowoso juga masih menghadapi tantangan budaya terkait pernikahan usia dini yang seringkali memaksa remaja (terutama perempuan) putus sekolah.
3. Pengeluaran per Kapita (Dimensi Standar Hidup Layak)

Ini adalah mesin utama kenaikan IPM Bondowoso periode 2023–2025.

- Analisis: Dengan pertumbuhan ekonomi 5,2% dan penurunan kemiskinan menjadi 12,2%, daya beli masyarakat Bondowoso meningkat secara riil.
- Sektor Agrobisnis: Petani kopi dan tembakau yang mulai merambah dunia hilirisasi kini memiliki pendapatan sisa (*disposable income*) yang lebih besar untuk dialokasikan pada gizi dan pendidikan keluarga.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain:

1. Program Pengembangan Kurikulum
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengelolaan Pendidikan
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 11. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 13. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3. Capaian Kinerja Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET/CAPAIAN 2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD (2026)	CAPAIAN RPD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan									
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	N/A	6	7,4	123,33%	memuaskan	7,2	103%
Sasaran 15 : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah Secara Merata									

Sumber : Propinsi Jawa Timur dalam Angka 2026

Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur (IKLI). Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 1 (Satu) Sasaran yaitu:

1. Sasaran 15: Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Wilayah Secara Merata

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah instrumen pengukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kualitas, ketersediaan, dan kemudahan akses infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Secara ringkas, IKLI mencakup 4 aspek utama:

- Infrastruktur Jalan & Jembatan: Menilai kelayakan jalan, kemulusan aspal, dan konektivitas antarwilayah.
- Infrastruktur Pengairan (Irigasi): Menilai kecukupan air untuk lahan pertanian (sangat krusial untuk daerah agraris seperti Bondowoso).

- Infrastruktur Air Bersih & Sanitasi: Menilai kualitas air minum dan sistem pembuangan limbah/drainase yang sehat.
- Infrastruktur Penunjang: Termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan fasilitas publik lainnya.

Berikut adalah analisis mengenai perkembangan IKLI Bondowoso:

1 Transformasi Kualitas Jalan (Aksesibilitas Wilayah)

Salah satu penyumbang terbesar kenaikan IKLI adalah peningkatan persentase Jalan Mantap yang menghubungkan pusat produksi pertanian ke pasar.

- Analisis: Pada 2023, keluhan masyarakat biasanya berpusat pada jalan rusak di area pinggiran. Di 2025, pembangunan jalan beton dan pengaspalan di jalur logistik (kopi dan tembakau) serta jalur wisata Ijen Geopark telah merubah persepsi publik.
- Dampak: Kecepatan distribusi barang meningkat, biaya logistik turun, dan kepuasan masyarakat yang tinggal di pedesaan melonjak drastis.

2 Infrastruktur Irigasi untuk Kedaulatan Pangan

Sebagai daerah agraris, kepuasan petani terhadap layanan irigasi adalah kunci.

- Analisis: Perbaikan jaringan irigasi primer dan sekunder memastikan pasokan air ke lahan pertanian lebih stabil. Hal ini berkaitan langsung dengan kemampuan petani mempertahankan produktivitas di tengah perubahan iklim.
- Dampak: Petani merasa didukung oleh pemerintah, yang tercermin dalam angka kepuasan layanan publik di sektor pertanian yang terus menguat.

3 Konektivitas Digital dan Penerangan Jalan

IKLI juga mencakup infrastruktur penunjang seperti penerangan jalan umum (PJU) dan akses internet di pelosok.

- Analisis: Program "Bondowoso Terang" dan perluasan jaringan internet di desa-desa wisata (smart desa) memberikan rasa aman dan kemudahan bagi warga.
- Dampak: PJU yang memadai menurunkan angka kriminalitas dan kecelakaan, sementara akses internet mempercepat digitalisasi UMKM desa.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Jalan
 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
4. Capaian Kinerja Tujuan 5 Meningkatnya kualitas lingkungan sosial dan budaya

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya Tahun 2025

Tujuan 5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya								
<i>Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sasaran 16 : Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan								
Sasaran 17 : Meningkatnya Toleransi Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan								
Sasaran 18 : Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban, serta Perlindungan Terhadap Masyarakat								

Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Harmoni Indonesia (IHaI). Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) Sasaran yaitu :

1. Sasaran 16: Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
2. Sasaran 17: Meningkatnya Toleransi Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
3. Sasaran 18: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban, serta Perlindungan Terhadap Masyarakat.

Indeks Harmoni (atau sering disebut sebagai Indeks Kerukunan Umat Beragama - KUB) di Kabupaten Bondowoso periode 2023–2025 menjadi pelengkap yang sangat krusial. Jika indikator ekonomi adalah "mesinnya", maka Indeks Harmoni adalah "pelumasnya". Tanpa harmoni sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif sulit untuk dicapai.

Bondowoso, dengan julukan Kota Santri dan keragaman budaya Madura serta Jawa, menunjukkan tren stabilitas sosial yang sangat positif. Berikut adalah analisis mengenai perkembangan harmoni sosial di Bondowoso:

1. Pilar Toleransi: Kedewasaan dalam Keberagaman

Bondowoso berhasil mempertahankan nilai-nilai moderasi beragama di tengah dinamika politik nasional (pasca Pemilu 2024).

- Analisis: Masyarakat Bondowoso memiliki modal sosial berupa "Kearifan Lokal" yang kuat. Tradisi saling menghormati antar-umat beragama dan antar-etnis (Jawa-Madura) tetap terjaga.
- Peran FKUB: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bondowoso sangat aktif melakukan dialog hingga ke tingkat desa, bukan hanya seremonial di tingkat kabupaten. Ini mencegah potensi gesekan horizontal sejak dini.

2. Pilar Kesetaraan: Akses Tanpa Diskriminasi

Kenaikan Indeks Harmoni ini sangat dipengaruhi oleh Reformasi Birokrasi (81,04%).

- Analisis: Ketika birokrasi bekerja secara transparan dan adil, masyarakat merasa diperlakukan setara. Tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bondowoso meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sesama warga.
- Dampak ke Gini Ratio: Rendahnya ketimpangan (0,271) juga membantu harmoni, karena kecemburuan sosial antar-kelompok ekonomi dapat diminimalisir.

3. Pilar Kerjasama: Gotong Royong sebagai Penggerak Ekonomi

Di Bondowoso, harmoni tidak hanya berarti "diam tidak bertengkar", tapi aktif bekerjasama.

- Analisis: Kolaborasi lintas komunitas dalam mengembangkan Ijen Geopark adalah bukti nyata. Warga dari berbagai latar belakang bekerjasama menjaga kelestarian alam dan menyambut wisatawan.
- Hilirisasi Kopi: Komunitas petani kopi di Bondowoso seringkali menjadi wadah pembauran lintas budaya dan agama yang produktif, mengubah potensi konflik menjadi potensi cuan bersama.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

5. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6. Capaian Kinerja Tujuan 6 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan Tahun 2025

<i>Tujuan 6 : Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Inklusif dan Berkelanjutan</i>								
<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	66,76	67,65	73,46	72,85	99,17%	<i>Sangat Berhasil</i>	73,77	99%
<i>Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman</i>								
<i>Sasaran 20 : Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</i>								

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup; 2026

Kinerja Tujuan Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 2 (Dua) Sasaran yaitu :

4. Sasaran 19: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
5. Sasaran 20: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bondowoso dari 66,76 (2023) menjadi 72,85 (2025) adalah sebuah pencapaian yang sangat krusial. Dalam terminologi lingkungan, lompatan ini menandakan transisi status dari "Cukup" menjadi "Baik".

Angka 72,85 ini menjadi bukti bahwa Bondowoso tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi (5,2%), tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat berkelanjutan (green growth). Berikut adalah analisis mendalam mengenai tiga pilar utama yang mendorong kenaikan IKLH tersebut:

1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL): Keberhasilan Ijen Geopark

Sebagai wilayah yang dikelilingi pegunungan, tutupan lahan adalah aset terbesar Bondowoso.

- Analisis: Peningkatan ini didorong oleh keberhasilan program penghijauan di kawasan lereng Ijen dan Argopuro. Status *UNESCO Global Geopark*

memberikan tekanan positif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat konservasi hutan.

- Dampak: Peningkatan luas tutupan pohon membantu menjaga stabilitas tanah dan mencegah bencana hidrometeorologi, yang pada gilirannya menjaga produktivitas lahan pertanian kopi di bawahnya.

2. Indeks Kualitas Air (IKA): Penataan Sanitasi dan Limbah

- Analisis: Penurunan angka kemiskinan dan kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas air. Pembangunan sistem drainase dan sanitasi pemukiman yang lebih baik mengurangi pencemaran limbah domestik ke sungai-sungai utama.
- Kaitan dengan Kesehatan: Air yang lebih bersih secara langsung berkontribusi pada kenaikan Angka Harapan Hidup (73,47 tahun) karena berkurangnya risiko penyakit berbasis air (*water-borne diseases*).

3. Indeks Kualitas Udara (IKU): Masih Terjaga di Ambang Batas Aman

- Analisis: Meskipun ada peningkatan aktivitas ekonomi dan transportasi di pusat kota, Bondowoso diuntungkan secara topografis. Sirkulasi udara pegunungan yang baik membuat angka IKU tetap tinggi.
- Strategi: Konsistensi dalam menjaga ruang terbuka hijau (RTH) di pusat kota menjadi kunci agar polusi kendaraan tidak merusak kualitas udara yang selama ini menjadi nilai jual wisata Bondowoso.

Program Pembangunan untuk mendukung capaian di atas antara lain :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3. Program Penanggulangan Bencana
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

BAB III
CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

3.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :

-

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang di selenggarakan di Kabupaten Bondowoso

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- Capaian Kinerja

-

- Realisasi Anggaran

Tabel 3,1
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM / KEG / SUB KEG / JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025	75.130.000	75.130.000	-	100
2	Posko TPA Kec. Bondowoso (TAMASYA)	1.505.700	1.505.700	-	100
3	Posko Keg.UPPKA Kec. Pujer	2.905.500	2.905.500	-	100
4	Posko Forum GenRe	1.585.000	1.585.000	-	100
5	Posko Kabupaten GATI	3.640.400	3.640.400	-	100
6	Posko Orientasi 1000 HPK (Kec. Wonosari dan Kec. Bondowoso)	10.030.000	10.030.000	-	100
7	Posko Kabupaten (KERABAT SERI 4)	36.435.000	36.435.000	-	100

NO	PROGRAM / KEG / SUB KEG / JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
8	Posko Penyuluh KB (Karnaval Lini Lapangan)	10.045.000	10.045.000	-	100
TOTAL		141.276.600	141.276.600	-	100

- d. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tabel 3.2
Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Pola pikir dan adat budaya di Kabupaten Bondowoso menjadi permasalahan utama. Masih banyak orang tua yang merasa gelisah apabila anaknya tidak menikah cepat, takut menjadi gunjingan dan budaya bertunangan / nikah sirri dengan kedok menghindari zina	Advokasi dan KIE kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dengan melibatkan tokoh agama dan organisasi pemuda dalam rangka meningkatkan usia ideal menikah bagi remaja
2	Masih banyak akseptor yang lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom)	Advokasi dan KIE kepada akseptor terkait penggunaan MKJP harus lebih dimaksimalkan lagi

2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso menerima pelaksanaan program/ kegiatan Dekonsentrasi / Banprog sebanyak 7 (tujuh) paket program pelatihan yaitu: Program Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Pelatihan Berbasis Kompetensi

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Dekonsentrasi

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Latihan Kerja Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 Dipa Awal Nomor : SP DIPA-02 Desember 2025, SP DIPA-026.13.2.051102/2025.
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal Tanggal 4 Februari 2025
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 1 Tanggal Bulan Mei tahun 2025

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pelatihan berbasis kompetensi yang merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi yang dilaksanakan oleh UPTD – Pelatihan Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso terdiri dari :

1. Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi 280 JP (1 Paket 16 Orang);
2. Bahan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran 260 JP (1 Paket 16 Orang);
3. Pelatihan Plate Welder SMAW 3G UP/PF 340 JP (1 Paket 16 Orang);
4. Pelatihan Teknisi Telepon Seluler Perangkat Keras 260 JP (1 Paket 16 Orang);
5. Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin 260 JP (1 Paket 16 Orang);
6. Pelatihan Practical Office Advance 260 JP 260 JP (1 Paket 16 Orang);
7. Pelatihan Desainer Grafis Muda 260 JP (1 Paket 16 Orang).

Keseluruhan pelatihan tersebut dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja Bondowoso, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja	Sumber Dana
Pelatihan Berbasis Kompetensi	Rp. 268.833.000,00	Rp 268.833.000,00	100,00 %	APBN

d. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

1. Permasalahan :Kurang nya sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelatihan sesuai skema pelatihan (SKKNI)
2. Solusi : Perlunya pengadaan sarana prasana dari pemerintah untuk kegiatan pelatihan sesuai skema pelatihan (SKKNI)

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
		Nasional						
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

4.1.3 Anggaran

Tabel 4.2
Anggaran Dasar
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BONDOWOSO	2,104,835,120,196,00
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	685,404,601,224,00
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	162,051,002,050,00
	APBD :	149,994,752,050,00
	A. APBD DAU	149,969,129,030,00
	B. APBD DAK NON FISIK	25,623,020,00
	DANA LAINNYA	12,056,250,000,00

Tabel 4.3
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
1	PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			15,651,158,716	12,337,822,322	78.83%
		Angka partisipasi sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2,552,190,000	1,077,195,302	42.21%
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	41,018,000	39,422,600	96.11 %
		literasi	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	783,297,500	707,136,004	90.28 %
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Orang	4,817,350,900	4,072,118,740	84.53 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	15,072,000	14,298,400	94.87%
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	18,094,400	15,472,600	85.51 %
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	27,510,600	21,756,364	79.08 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	61,980,400	56,867,582	91.75 %
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	111,673,100	106,011,135	94.93 %
		numerasi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	4,817,350,900	4,072,118,740	84.53 %
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	Orang	15,072,000	14,298,400	94.87 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama				
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	24,531,000	21,682,987	88.39 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	61,980,400	56,867,582	91.75 %
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	111,673,100	106,011,135	94.93 %
			Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Paket	783,297,600	707,136,004	90.28 %
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %
		Keamanan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	206,045,672	163,062,352	79.14 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	24,976,600	22,549,557	90.28 %
		kebhinekaan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Kapasitas Bidang Pendidikan				
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	206,045,672	163,062,352	79.14 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	24,976,600	22,549,557	90.28 %
		Inklusifitas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	206,045,672	163,062,352	79.14 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	24,976,600	22,549,557	90.28 %
3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			20,002,688,800	19,618,808,191	98.08
		Angka partisipasi sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	2,300,000,000	2,300,000,000	100
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	13,652,400,000	13,530,800,000	99.11
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Dokumen	107,914,000	103,497,031	95.91

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Bidang Pendidikan				
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	250,000,000	247,645,711	99.06
		Kekhususan PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	unit	1,500,000,000	1,485,575,428	99.04
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	paket	1,814,135,000	1,593,479,370	87.84
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan pendidikan	200,000,000	196,377,600	98.19
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	35,295,700	33,012,511	93.53
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	68,642,500	61,015,985	88.89
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	19,017,000	17,352,000	91.24
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang	55,284,600	50,052,555	90.54
4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			15,771,364,326	12,955,118,520	82.14
		Angka partisipasi sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	42,343,054	39,873,893	94.17
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	682,377,000	677,619,725	99.30
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	5,483,673,000	3,690,920,035	67.31

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Sekolah				
		Literasi	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,509,585,100	1,457,420,222	96.54
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	15,072,000	14,298,400	94.87
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	30,000,000	25,046,400	83.49
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	25,000,000	22,293,200	89.17
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	228,684,000	214,952,801	94.00
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	104,391,000	85,656,515	82.05
		Numerasi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	4,817,350,900	4,072,118,740	84.53 %
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	15,072,000	14,298,400	94.87 %
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	30,000,000	25,046,400	83.49 %
			Pelatihan	Orang	24,531,000	21,682,987	88.39 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	25,000,000	22,293,200	89.17 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	104,391,000	85,656,515	82.05 %
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	228,884,000	214,952,801	93.91 %
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,509,585,100	1,457,420,222	96.54 %
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %
		Keamanan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	34,079,750	25,800,698	75.71 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	16,140,000	14,943,300	92.59 %
		kebhinekaan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	34,079,750	25,800,698	75.71 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	16,140,000	14,943,300	92.59 %
		Inklusifitas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	143,200,000	138,518,604	96.73 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	206,045,672	163,062,352	79.14 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	16,140,000	14,943,300	92.59 %
		Pendidikan kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4,872,577,700	4,122,462,355	84.61 %
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	Dokumen	55,226,800	50,343,615	91.16 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	4,817,350,900	4,072,118,740	84.53 %

4.1.4 Dukungan personal

Jumlah pegawai yg menangani SPM berjumlah 3 (tiga) orang.

4.1.5 Hasil Capaian

Tabel 4.4
Indeks Hasil Capaian
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
1	PAUD	Orang	33.414	33.414	0	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	97.6	97.72	-0.12	
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	66.55	66.14	0.41	99.38
	3. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	72.39	75.66	-3.27	100
2	Pendidikan Dasar	Orang	65.825	65.825	0	
	SD					
	1. Angka partisipasi sekolah	%	98.34	98.58	-0.24	
	2. Kemampuan literasi	Nilai	60.7	68.06	-7.36	
	3. Kemampuan numerasi	Nilai	57.45	70.34	-12.89	
	4. Indeks iklim keamanan	Nilai	75.01	74.1	0.91	
	5. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.95	69.95	1.0	
	6. Indeks iklim	Nilai	60.88	58.38	2.5	

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
	inklusi					
	SMP					
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	
	2. Kemampuan literasi	Nilai	67.16	66.2	0.96	
	3. Kemampuan numerasi	Nilai	61.85	66.79	-4.94	
	4. Indeks iklim keamanan	Nilai	69.3	67.79		
	5. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.8	68.79	1.01	
	6. 9 . Indeks iklim inklusi	Nilai	58.89	56.49	2.4	
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	13.813	13.813	0	
	Angka partisipasi sekolah	%	43.59	43.59		

4.1.6 Permasalahan dan solusi

Tabel 4.5
Permasalahan dan Solusi
Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025

RINCIAN PERMASALAHAN
1 . Masih terdapat gedung sekolah rusak berat dan rusak sedang.
2 . Masih banyak Siswa Miskin yang terdaftar dalam P3KE
3 . Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah
4 . Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan masih belum maksimal
5 . Belum terdistribusinya guru secara merata di wilayah Kabupaten Bondowoso yang diakibatkan untuk Kabupaten Bondowoso masih kekurangan guru yang signifikan sehingga masih banyak kelas yang diisi oleh tenaga sukarelawan
6 . Belum seluruhnya lembaga sekolah memiliki gedung Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang Lainnya
7 . Masih terdapat angka Droup Out (DO) peserta didik pada tingkat pendidikan dasar
8 . Pengurangan anggaran yang mengakibatkan kurang maksimalnya capaian program dan kegiatan.
9. Masih rendahnya capaian literasi, numerasi, iklim keamanan, dan inklusi

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kesehatan ibu hamil, Kesehatan ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif, kesehatan pada usia lanjut, kesehatan penderita hipertensi, kesehatan penderita diabetes mellitus, Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,

kesehatan orang terduga tuberculosis, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

4.2.2 Target Pencapaian Spm

Tabel 4.6
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
	Kesehatan ibu hami	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KESEHATAN
	Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	kesehatan	Jumlah Warga	100%	Setiap	Jumlah	100%	Setiap	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
	penderita hipertensi	Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		tahun	barang, jasa dan sumber daya manusia		tahun	
	kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

4.2.3 Anggaran

Tabel 4.7
Anggaran Dasar
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD KAB. BONDOWOSO	2.104.835.120.196,00
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	290.804.117.555,00

NO	PENDANAAN	PAGU
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	130.150.982.057,00
	APBD KABUPATEN BONDOWOSO	129.880.382.057,00
	A. APBD MURNI	13.330.635.600,00
	B. APBD DAU	36.465.099.977,00
	C. APBD DAK FISIK	3.816.786.000,00
	D. APBD DAK NON FISIK	27.804.735.000,00
	E. DANA BAGI HASIL	48.463.125.480,00
	DANA LAINNYA	270.600.000,00

Tabel 4.8
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1.	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten			5,378,631,900	4,728,038,820	87.90 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	2,896,303,900	2,858,984,575	98.71 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	209,677,000	170,730,000	81.43 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	292,955,000	191,300,700	65.30 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	175,710,000	150,481,395	85.64 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	560,347,500	517,957,800	92.44 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	21,022,500	18,504,500	88.02 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	22,930,000	20,830,000	90.84 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan	Orang	3,270,000	3,200,000	97.86 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			penderita Hipertensi				
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1,470,000	1,470,000	100.00 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	341,669,500	309,597,450	90.61 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	275,257,000	226,142,300	82.16 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	578,019,500	258,840,100	44.78 %
		Program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya	Pengembangan Puskesmas		7,081,484,600	5,147,629,699	72.69 %
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		5,518,338,550	4,166,359,764	75.50 %
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		15,467,170,577	10,161,505,449	65.70 %
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		300,000,000	274,407,930	91.47 %
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		711,679,190	520,357,379	73.12 %
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas		19,253,409,400	15,203,807,182	78.97 %

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Kesehatan				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		270,600,000	269,789,000	99.70 %
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		155,586,000	95,026,450	61.08 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		9,361,894,000	7,412,963,658	79.18 %
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		220,723,000	105,369,085	47.74 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		92,700,000	83,200,000	89.75 %
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		2,803,116,590	1,963,200,274	70.04 %
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		512,432,000	508,254,000	99.18 %
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		414,247,600	392,658,500	94.79 %
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usia		249,800,000	244,100,000	97.72 %
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		62,359,168,650	60,954,302,260	97.75 %

4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yg menangani SPM di Dinas Kesehatan sebanyak 12 (dua belas) orang.

4.2.5 Hasil Capaian

Tabel 4.9
Indeks Hasil Capaian
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
1	PAUD	Orang	33.414	33.414	0	
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	97.6	97.72	-0.12	
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	66.55	66.14	0.41	99.38
	3. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	72.39	75.66	-3.27	100
2	Pendidikan Dasar	Orang	65.825	65.825	0	
	SD					
	1. Angka partisipasi sekolah	%	98.34	98.58	-0.24	
	2. Kemampuan literasi	Nilai	60.7	68.06	-7.36	
	3. Kemampuan numerasi	Nilai	57.45	70.34	-12.89	
	4. Indeks iklim keamanan	Nilai	75.01	74.1	0.91	
	5. Indeks iklim	Nilai	70.95	69.95	1.0	

No	Kategori Indeks Pencapaian	Satuan	Indikator Output			Total Pencapaian
			Yang harus dilayani	Yang terlayani	Yang belum terlayani	
	kebhinekaan					
	6. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.88	58.38	2.5	
	SMP					
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	
	2. Kemampuan literasi	Nilai	67.16	66.2	0.96	
	3. Kemampuan numerasi	Nilai	61.85	66.79	-4.94	
	4. Indeks iklim keamanan	Nilai	69.3	67.79		
	5. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.8	68.79	1.01	
	6. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.89	56.49	2.4	
3	Pendidikan Kesenjangan	Orang	13.813	13.813	0	
	Angka partisipasi sekolah	%	43.59	43.59		

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.10
Permasalahan dan Solusi
Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025

JENIS
1 . masih adanya Wanita usia subur dengan penyakit penyerta yang hamil (tidak layak hamil), kurang tanggapnya keluarga tentang tanda bahaya dalam kehamilan sehingga terjadi keterlambatan dalam deteksi dan penanganan.
2 . Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir belum 100% dikarenakan adanya bayi baru lahir yang tidak di IMD karena bayi mengalami komplikasi, Persalinan Prematur 420 kasus, Bayi dengan berat badan lahir rendah sebanyak 826 bayi, Neonatal komplikasi ditangani sebanyak 1194 kasus
3 . Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar masih belum 100% dikarenakan anak usia pendidikan dasar pada wilker puskesmas banyak yang sekolah diluar wilayah puskesmas setempat
4 . Total Persalinan tahun 2025 Kab Bondowoso 9130, Persalinan di Tenaga Kesehatan Tapi tidak di fasyankes (Rumah Ibu, Ponkesdes, Pustu) sebanyak 64 persalinan dan Persalinan dukun 15 kasus
5 . Pelayanan kesehatan ibu hamil belum 100% dikarenakan kasus abortus 500, Ibu Hamil memeriksakan kehamilan ketika umur kehamilan lebih dari 3 bulan, adanya Geografi yang sulit

sehingga ibu hamil tidak melakukan ANC Terpadu 2 kali selama masa kehamilan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.11
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2..	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

4.3.3 Anggaran

Tabel 4.12
Anggaran Dasar
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

NO.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD KAB. BONDOWOSO	2.104.835.120.196,00
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	21.344.388.852,00
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4.215.694.401,00
	APBD :	4.215.694.401,00
	APBD DAU	4.215.694.401,00

Tabel 4.13
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

N o	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
1	PENGELOL AAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAA N AIR MINUM	Pengelol aan dan Pengemb angan Sistem Penyedia an Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupate n	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1,000,000,000	990,311,598	99.03 %
2	PENGELOL AAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelol aan dan Pengemb angan Sistem Air Limbah Domesti k (SPALD) dalam Daerah Kabupate n	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /hari	3,215,694,401	3,079,850,248	95.78 %

4.3.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM adalah 2 (dua) orang.

4.3.5 Hasil Capaian

Tabel 4.14
Indeks Hasil Capaian
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AK SI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLA YANI	BELUM TERLAYANI		
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI						
	JARINGAN PERPIPAAN	Orang	140	140	0	100.00 %	
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah	Rumah	35	35			

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
	Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Tangga					
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	35	35			
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga					
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang	Rumah Tangga					

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
	mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau						
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	orang					
	Kuantitas SPALD						
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	147	147			
	Kualitas SPALD						
	System pengelolaan air limbah domestic setempat (SPALD-S)						
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah	Rumah Tangga	147	147			

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
	atau cubluk kembar						

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.15
Permasalahan dan Solusi
Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

JENIS PERMASALAHAN
1 . Realisasi anggaran tidak bisa 100% karena masih terdapat sisa kontrak pada pekerjaan fisik
2 . Terdapat Penyesuaian Anggaran pada Triwulan 3 sehingga ada perubahan pada target dan capaian
3 . Belum ada realisasi dikarenakan masih dalam tahap perencanaan dan ada beberapa pergeseran anggaran yang berdampak pada waktu mulainya pelaksanaan kegiatan fisik.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.16
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni						

4.4.3 Anggaran

Tabel 4.17
Anggaran Dasar
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025

NO.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD KAB. BONDOWOSO	2.104.835.120.196,00
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	20.913.888.852,00
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	250.000.000,00
	APBD :	250.000.000,00
	APBD DAU	250.000.000,00

Tabel 4.18
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
1	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit rumah	240.000.000,00	240.000.000,00	100.00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA		Honorarium pendamping		10.000.000,00	10.000.000,00	100.00 %

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM adalah 5 (lima) orang.

4.4.5 Hasil Capaian

Tabel 4.19
Indeks Hasil Capaian
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun Anggaran 2025

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATU AN	INDIKATOR OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Orang	36	36	0	100.00 %
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	12	12	0	100.00 %

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.20
Permasalahan dan Solusi
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2025

NO	JENIS
1	Penganggaran telah disediakan pada tahun berjalan, sehingga apabila terjadi bencana, pelaksanaan Pembangunan Kembali Rumah Terdampak Bencana dapat dilakukan pada tahun yang sama. Pada Tahun 2025, disediakan anggaran untuk 20 unit Pembangunan Kembali Rumah Terdampak Bencana. Program ini diperuntukkan khusus bagi rumah dengan klasifikasi rusak berat.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4. 21
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kot a	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN/KOTA
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

N o	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
		korban kebakaran						

4.5.3 Anggaran

Tabel 4.22
Anggaran Dasar
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD KAB. BONDOWOSO	2,104,835,120,196
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	13,532,891,505
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6,489,994,755
	APBD :	6,489,994,755
	A. APBD DAU	2,950,473,250
	B. DANA BAGI HASIL	3,539,521,505

Tabel 4.23
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
1.	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				4,012,782,605	2,863,847,943	71.37 %
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten			445,077,400	316,579,037	71.13 %
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam	Dokumen	118,531,600	98,104,800	82.77 %

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			rangka ketentraman dan ketertiban umum				
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	30,247,000	23,895,121	79.00 %
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	38,900,000	0	0%
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	257,398,800	194,579,116	75.59 %
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan			3,567,705,205	2,547,268,906	71.40 %

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		Bupati					
			Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	1,415,963,640	972,489,252	68.68 %
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	51,143,700	47,617,630	93.11 %
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	2,100,597,865	1,527,162,024	72.70 %
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				2,060,708,900	2,008,392,406	97.46 %
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten			104,025,450	101,199,450	97.28 %
			Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	62,128,900	61,275,250	98.63 %
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Orang	41,896,550	39,924,200	95.29 %
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,110,818,850	1,078,491,890	97.09 %
			Penguatan	Kawasa	474,862,700	468,365,200	98.63 %

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	n			
			Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	62,697,900	62,108,430	99.06 %
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	22,213,300	22,204,900	99.96 %
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	18,737,000	17,038,500	90.94 %
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kawasan	433,512,850	414,214,860	95.55 %
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Laporan	98,795,100	94,560,000	95.71 %
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			755,864,600	741,064,366	98.04 %
			Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	93,080,000	83,182,800	89.37 %
			Respon cepat darurat bencana	Dokumen	6,180,000	6,180,000	100.00 %

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Kabupaten/ Kota				
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	Orang	66,604,600	66,139,600	99.30 %
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	Orang	580,000,000	575,562,466	99.23 %
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	10,000,000	9,999,500	100.00 %
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			90,000,000	87,636,700	97.37 %
			Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	8,079,100	8,071,600	99.91 %
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Orang	71,920,900	69,597,200	96.77 %
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	10,000,000	9,967,900	99.68 %
3.	PROGRAM				416,503,250	385,184,100	92.48 %

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)						
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten			390,635,250	359,614,300	92.06 %
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	178,391,750	175,142,800	98.18 %
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	71,200,000	52,040,000	73.09 %
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	141,043,500	132,431,500	93.89 %
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
			Pemberdayaan masyarakat	Orang	25,868,000	25,569,800	98.85 %

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat				

4.5.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM sebanyak 1 (satu) orang dari Satpol PP dan 5 (lima) orang dari BPBD.

4.5.5 Hasil Capaian

Tabel 4.24
Indeks Hasil Capaian
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2025

N O	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			PEN CAP AIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten	Orang	1.750	1.520	230	86.86 %
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	24	24	0	100.00 %
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)					
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan	dokumen	28	28	0	100.00 %

	Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023					
	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)					
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	38	38	0	100.00 %
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100.00 %
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	3.900	3.900	0	100.00 %
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana					
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan					

	Penduduk di Daerah Rawan Bencana					
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1.050	1.050	0	100.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	11	11	0	100.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	6	6	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik					
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	18	18	0	100.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim	orang	10	10	0	100.

	Teknis (sesuai dengan kebutuhan)					00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100.00 %
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	3.900	3.900	0	100.00 %
	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)					
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	8	8	0	100.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	30	30	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12	0	100.00 %
	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi					
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	f. Tersedianya	orang	90	90	0	100.

	Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)					00 %
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	180	180	0	100.00 %
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)					
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	Gladi Lapang					
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %

	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	60	60	0	100.00 %
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7	7	0	100.00 %
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					

	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat					
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	0	100.00 %
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	864	844	20	97.69 %
	Respon Cepat Darurat Bencana					
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	11	11	0	100.00 %
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	17	17	0	100.00 %
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana					
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat	paket	1	1	0	100.00 %

	lapangan (sesuai dengan kebutuhan)					
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	0	100.00 %
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	0	100.00 %
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	17	17	0	100.00 %
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	17	17	0	100.00 %
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	3.500	4.268	-768	100.00 %
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	16	13	3	81.25 %
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	5	5	0	100.00 %
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	12	12	0	100.00 %
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas	Orang	22	22	0	100.00 %

	aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia					
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	50	57	-7	100.00 %
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	85	76	9	89.41 %

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.25
Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025

A.	DAFTAR PERMASALAHAN
1.	Keterbatasan anggaran daerah
2.	Belum adanya Unit Pos Darurat Bencana Kebakaran di beberapa titik Lokasi untuk menjangkau lokasi pelosok – pelosok desa yang didukung dengan Armada Pemadam Kebakaran yang baru serta personil yang memadai.
3.	Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas untuk sarana pemadam kebakaran.
4.	Minimnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan / penanganan awal bencana kebakaran
5.	Jumlah personil belum sesuai kebutuhan, berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, bahwa 1 armada 6 personil.
6.	Keterbatasan anggaran daerah
7.	Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas untuk sarana patroli.
8.	Kurangnya tenaga penyidik (PPNS)
9.	Masih rendahnya keterampilan dan SDM bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, jadi dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan Kesamaptaaan dan Bimtek.

A.	DAFTAR PERMASALAHAN
10.	Jumlah personil belum sesuai kebutuhan, karena rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk harus ada 6 personil, berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, sedangkan kondisi riil saat ini yaitu per 10.000 penduduk terdapat 2 personil.
11.	Keterbatasan Anggaran Daerah yang tersedia
12.	Keterbatasan personil kebencanaan serta sarana dan prasarana kebencanaan
13.	Format data yang terlalu detail sampai NIK menyulitkan dalam pengisian format tersebut
14.	Terbatasnya Kompetensi SDM Penanggulangan Bencana
15.	Luasnya Wilayah Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bondowoso
16.	Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas terutama untuk sarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan patroli
17.	Kurangnya tenaga penyidik (PPNS)
18.	SDM belum sesuai kebutuhan, karena rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk harus ada 6 personil, berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
19.	Kesulitan dalam pengumpulan data by name by adress
20.	Kelembagaan Organisasi BPBD yang kurang efektif
21.	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
22.	Luasnya Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bondowoso
23.	Terbatasnya Kapasitas Aparatur SDM Penanggulangan Bencana
24.	Adanya Efisiensi Anggaran sehingga kegiatan masih belum terlaksana, serta terbatasnya anggaran Penanggulangan Bencana

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4. 26
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Tar get	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
1	Pelayanan ketentera man dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Ko ta	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN/KOT A
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelama tan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelama tan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100%	Setiap tahun	

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Tar get	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
	evakuasi korban kebakaran	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			daya manusia			

4.6.3 Anggaran

Tabel 4.27
Anggaran Dasar
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD KAB. BONDOWOSO	2,104,835,120,196
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	23,525,991,825
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	741,000,000
	APBD :	741,000,000
	A. APBD DAU	741,000,000

Tabel 4.28
Anggaran Rincian Kegiatan
Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
1.	REHABILITASI SOSIAL				741,000,000	684,790,218	92.41 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			663,000,000	632,485,385	95.40 %
			Penyediaan permakanaan	Orang	211,000,000	191,463,604	
			Penyediaan sandang	Orang	2,000,000	2,000,000	
			Penyediaan alat bantu	Orang	20,000,000	18,050,000	
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2,000,000	2,000,000	
			Pemberian bimbingan fisik, mental,	Orang	100,000,000	98,486,100	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			spiritual, dan sosial				
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	315,000,000	307,485,681	
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2,000,000	2,000,000	
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	3,000,000	3,000,000	
			Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	2,000,000	2,000,000	
			Pemberian layanan kedaruratan	Orang	2,000,000	2,000,000	
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2,000,000	2,000,000	
			Pemberian layanan rujukan	dokumen	2,000,000	2,000,000	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten			78,000,000	52,304,833	67.06 %
			Penyediaan makanan	Orang	50,000,000	34,746,000	69.49 %
			Penyediaan sandang	Orang	20,000,000	16,313,833	81.57 %

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN (Rupiah)	PELAKSANAAN (Rupiah)	SERAPAN
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2,000,000	0	0%
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	4,000,000	0	0%
			Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2,000,000	1,245,000	62.25 %

4.6.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM sebanyak 4 (empat) orang.

4.6.5 Hasil Capaian

Tabel 4.29
Indeks Hasil Capaian
Urusan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	262	261	1	99.62 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	103	103	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	79	79	0.00	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
	penyandang disabilitas terlantar					
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Orang	302	302	0	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	10	10	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	90	90	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	50	50	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	50	50	0.00	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	52	52	0.00	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian	Orang	5	5	0.00	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
	pelayanan reunifikasi keluarga					
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	1.511	1.511	0	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1.133	1.133	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	225	225	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	58	58	0.00	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	54	54	0	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	20	20	0.00	100.00 %

NO	INDIKATOR JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR OUTPUT			PENCAPAIAN
			YANG HARUS DILAYANI	TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	238	238	0	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	75	75	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	75	75	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	12	12	0.00	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	75	75	0.00	100.00 %

4.6.6 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

JENIS
1 . Kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan
2 . Pengumpulan Data Sasaran membutuhkan proses dan verlap baik melalui sanding Data DTKS dan assesment tim relawan

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan upaya optimal yang dicapai dari hasil kerja keras semua pihak, baik jajaran eksekutif, legislatif maupun masyarakat pada umumnya. Capaian tersebut harus dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. LPPD ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat guna menuju ***“PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA INKLUSIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”***.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping prestasi dan keberhasilan juga terdapat kelemahan dan kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu melalui mekanisme LPPD ini, kami mengharapkan saran, masukan dan rekomendasi yang konstruktif agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat Bondowoso. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.

Bondowoso, 31 Maret 2026

BUPATI BONDOWOSO



ABD. HAMID WAHID

